



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

**RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PONOROGO

Kantor Terpadu Gedung Graha Bakti Praja

Jalan Basuki Rahmat Lantai 1 dan 2

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo ini memuat kondisi umum, isu-isu strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda pembangunan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 yang akan datang.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo ini, diharapkan seluruh organisasi perangkat daerah dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau acuan untuk merencanakan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai dengan APBD Kabupaten dan APBN maupun sumber pendanaan lainnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini masih belum sempurna, namun harapan kami program-program di bidang Kesehatan Kabupaten Ponorogo berguna bagi kita semua.

Ponorogo, 1 Agustus 2024

Kepala Dinas Kesehatan

The image shows a circular official stamp of the Ponorogo Health Office. The text around the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO" and "DINAS KESEHATAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Dyah Ayu Puspitaningarti, SKM.,M.Kes.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197602062002122012

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
SK Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	v

LAMPIRAN

RENCANA KERJA.PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar.Belakang	1
1.2	Landasan.Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan.....	4
1.4	Sistematika.Penulisan	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	33
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5	Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	56
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	58
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	58
3.3	Program dan Kegiatan	59
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	85
BAB V	PENUTUP	97

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Ponorogo.....	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo	32
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Ponorogo	35
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Ponorogo	57
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Ponorogo	62
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	86



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KESEHATAN

Jl. Basuki Rahmat Gedung Terpadu Graha Bhakti Praja Lt. 1 dan 2, Ponorogo,
Jawa Timur, Kode Pos 63418,
Telepon (0352)481438, Faximile (0352) 484550,
Laman dinkes.ponorogo.go.id, Pos-el dinkes.png@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 000.3/789/405.09/2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PONOROGO SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2025 dengan menuangkannya dalam suatu keputusan Kepala Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor ; 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 50 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2023;
24. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 188.4/6447/405.09/2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
- (2) Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan pembangunan Dinas Kesehatan periode 1 (satu) tahun;

- (3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan merupakan :

- (1) Penjabaran lebih lanjut atas tujuan dan sasaran Kepala Dinas Kesehatan yang telah dijabarkan melalui Rencana Strategis Tahun 2021-2026;
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memberikan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan bagian aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan DPA Dinas Kesehatan;
- (2) Renja Dinas Kesehatan bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan program dan kegiatan kabupaten dengan Propinsi.

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - e. Bab V : Penutup.
- (2) Isi dan uraian Renja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 4 April 2024

Kepala Dinas Kesehatan
selaku Pengguna Anggaran,



Dyah Ayu Puspitaningarti, SKM, M. Kes.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197602062002122012

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 000.3/789/405.09/2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025**

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
- c. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2025 ini yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) 2021-2026.

Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2025 menyusun Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk memberikan landasan dan pedoman sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025. Dokumen ini akan bermanfaat bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelaksanaan maupun pembiayaan program untuk tahun 2025.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo melakukan penyusunan Renja PD Tahun 2025 dengan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Ponorogo. Digunakannya substansi sasaran dan formula indikator Renstra atau RPJMD Tahun 2021–2026 sebagai acuan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2025 didasarkan oleh alasan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas mengamanatkan struktur organisasi Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dinas Kesehatan perlu dilakukan penyesuaian.

- b. Penyusunan indikator dalam Rencana Kerja tahun 2025 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diuraikan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.
- c. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Dalam dokumen Renja PD, Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Setiap program dan kegiatan dalam Renja PD Tahun 2025 yang menyajikan nilai pagu indikatif dan indikator capaian telah melalui proses verifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan dianalisis dengan strategi prioritas serta kemampuan kinerja daerah secara menyeluruh.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD pada Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang;
- c. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- d. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan daerah Propinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- n. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021;
- q. Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dinas Kesehatan;

- r. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 50 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025;
- s. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 188.4/6447/405.09/2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021–2026.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo disusun dengan maksud untuk menyamakan tujuan dan sasaran serta memberi arah dan pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dalam penyelenggaraan program kerja kesehatan, mendukung program kerja kepala daerah selama 5 (lima) tahun yang akan datang, serta menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal ini dicapai dengan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan serta pemanfaatan fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang didukung oleh informasi kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta kebijakan kesehatan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo ini adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan Dinas Kesehatan yang disusun agar terdapat kesesuaian dan keselarasan dalam perencanaan program dan kegiatan di Kabupaten Ponorogo.
2. Sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dan jajarannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
3. Sebagai alat evaluasi capaian dan kinerja Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembankan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen harus dievaluasi dalam perencanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Kerja Tahun 2023. Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan bagi perangkat daerah. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada pencapaian indikator keberhasilan suatu program dan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang dikaitkan dengan indikator tersebut.

Alokasi anggaran dan belanja untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
A	DINAS KESEHATAN			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	296.085.439	246.730.000	97
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77.214.119.072	73.491.515.604	95
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	593.263.454	513.299.143	87

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.174.600	63.885.000	95
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	809.163.129	739.849.520	91,43
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	433.731.289	424.652.778	97,9
1.7	Peningkatan Pelayanan BLUD	47.935.972.483	46.884.149.757	98
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
2.8	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	51.244.496.617	47.661.951.514	93
2.9	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.714.670.374	56.228.597.079	94,2
2.11	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	552.860.600	528.672.103	96
2.12	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	955.113.500	909.348.675	95,2
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			
3.13	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	5.523.093.264	4.526.906.776	81,96
3.14	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	4.441.784.620	3.874.876.034	87
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman			
4.15	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat	49.602.500	40.408.500	81,5

	Tradisional (UMOT)			
NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4.16	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	222.612.000	182.143.500	82
4.17	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	250.991.500	238.605.993	95
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
5.18	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.503.780.721	2.446.550.900	98

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis 2016-2021, dimana program dan kegiatan tertuang dalam KUA PPAS Tahun 2024. Pada Tahun 2025 alokasi dana ditujukan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
3. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa

Adapun pencapaian indikator sasaran tersebut dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	a. Persentase Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana yang memadai	100%	93%	100%	100%	100%	100%		
		b. Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program dan anggaran secara partisipatif dan tepat waktu	100%	95%	100%	89.5%	89.5%	100%		
		c. Persentase pelaksanaan administrasi, realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan asset yang akuntabel	100%	95%	100%	92%	92.3900%	100%		
2.01	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a.1 Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100.0%	100%	89.5%	90%	100%		
01	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	a) Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai juknis	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	100%	6 dok		
		b) Jumlah dokumen usulan anggaran yang disusun sesuai timeline dan juknis	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	100%	6 dok		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
02	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	a) Persentase dokumen SPP/SPM yang diterbitkan sesuai pengajuan	100%	94.77%	100%	100%	100%	100%		
		b) Persentase pengelola keuangan dan barang diberikan honorinya	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
08	3) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	a) Jumlah dokumen laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok		
		b) Jumlah dokumen rekonsiliasi penerimaan yang diterbitkan	372 dok	372 dok	372 dok	372 dok	100%	372 dok		
		c) Jumlah dokumen rekonsiliasi asset tetap yang diterbitkan	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok		
		d) Jumlah dokumen SP3B yang diterbitkan	372 dok	372 dok	372 dok	372 dok	100%	372 dok		
		e) Jumlah dokumen rekomendasi hibah yang diterbitkan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok		
		f) Jumlah kerangka acuan kegiatan puskesmas yang dikaji	31 KAK	31 KAK	31 KAK	31 KAK	100%	31 KAK		
		g) Jumlah puskesmas yang disupervisi dalam rangka pelaksanaan kebijakan upaya kesehatan	31 Pusk	31 Pusk	31 Pusk	29 Pusk	100%	31 Pusk		
		h) Jumlah rancangan laporan pengelolaan keuangan yang disusun dan atau dikaji	3751 Lap	3751 Lap	3751 Lap	384 Lap	90%	3751 Lap		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.06	1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	a.3 Persentase administrasi perkantoran dilaksanakan sesuai SOP	100%	93%	100%	91.2%	76%	100%		
01	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	a) Persentase komponen listrik disediakan sesuai rencana	100%	89%	100%	100%	100%	100%		
04	2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a) Persentase makanan minuman disediakan sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	88%	100%		
		b) Persentase kegiatan Pengadaan ATK yang dikelola sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	88%	100%		
05	3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	a) Persentase kegiatan cetak/penggandaan yang dikelola sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	47%	100%		
06	4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	a) Persentase media cetak dan peraturan hukum disediakan sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	33%	100%		
09	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a) Persentase pegawai yang dibiayai perjalanan dinas sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.07	1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a.4 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	83%	100%	95%	93%	100%		
02	1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a. Persentase pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dilaksanakan sesuai rencana	100%	89%	100%	100%	90%	100%		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
11	2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	a. Persentase pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan sesuai rencana	100%	95%	100%	100%	98%	100%		
2.08	1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a.5 Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	81%	100%	91.2%	76%	100%		
		b.5 Persentase administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	91%	100%	100%	80%	100%		
01	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	a) Persentase kegiatan administrasi kantor (surat menyurat) yang dikelola sesuai rencana	100%	67%	100%	100%	67%	100%		
02	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	a) Persentase komponen pendukung perkantoran (telpon, air, listrik) dikelola sesuai rencana	100%	96%	100%	100%	97%	100%		
04	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a) Persentase jasa administrasi dikelola sesuai rencana	100%	96%	100%	100%	80%	100%		
		b) Persentase jasa kebersihan kantor dilaksanakan sesuai rencana	100%	80%	100%	100%	80%	100%		
2.09	1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a.6 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	90%	100%	95%	93%	100%		
02	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	a) Persentase jasa pemeliharaan kendaraan dinas dilaksanakan sesuai rencana	100%	95%	100%	100%	97%	100%		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Dinas Operasional atau Lapangan	b) Persentase kendaraan dinas yang diurus pajaknya sesuai rencana	100%	96%	100%	100%	97%	100%		
05	2) Pemeliharaan Mebelair	a) Persentase jasa pemeliharaan mebeleur dilaksanakan sesuai rencana	100%	87%	100%	100%	88%	100%		
06	3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	a) Persentase jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan sesuai rencana	100%	93%	100%	100%	95%	100%		
1.02.02	2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	a. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	94.04	349.86	94.08	79.70	85%	94.06		
		b. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	11.89	11.89	11.93	14.80	80%	11.91		
		c. Prevalensi balita stunting	<20%	15.61%	<20%	9.33%	100%	<20%		
		d. Indeks Kepuasan Masyarakat	90	81.49	89	87.66	98%	90		
		e. % puskesmas terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		f. % Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	5.2%	3.20%	4.2%	61.29%	100%	4.7%		
		g. CFR Covid-19	<2%	11.60%	<6%	6.40%	93%	<4%	< 2 %	100%
		h. CFR HIV/AIDS	24%	13%	28%	8.40%	100%	26%		
		i. CFR TB paru per 100.000	4.96	6.61	5.16	3.76	100%	5.06		
		j. Persentase Desa Bebas DBD	56%	1.60%	52%	17%	33%	54%		
		k. Proporsi penderita kusta anak	0%	6%	0%	2.1%	42%	0%		
		l. Persentase Desa UCI	100%	92.20%	97%	70.60%	73%	98%		
		m. Prevalensi Hipertensi	40.02%	6%	40.12%	18.9%	100%	40.07%		
		o. Prevalensi Diabetes melitus	1.98%	2%	2.08%	2.1%	100%	2.03%		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
14	5) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	a) Persentase pengadaan alkes sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
20	6) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	a) Persentase alkes yang terkalibrasi sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
16	7) Pengadaan Obat, Vaksin	a) Persentase pengadaan jumlah dan jenis obat dan vaksin sesuai rencana	100%	97%	100%	100%	100%	100%		
17	8) Pengadaan Bahan Habis Pakai	a) Persentase pengadaan jumlah dan jenis BMHP sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
21	9) Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	a) Persentase operasional distribusi alkes, obat, vaksin, BMHP dan makanan minuman sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.02	1.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	a.2 Persentase K4	93%	89%	91%	78%	85.71%	92%		
		c.2 Persentase peserta KB aktif	70%	72%	70%	72%	102.86%	70%		
		d.2 Persentase pelayanan kesehatan pada balita	94%	86%	92%	90%	97.83%	93%		
		e.2 Persentase pelayanan kesehatan pada anak SD	88%	93%	86%	83.39%	96.97%	87%		
		f.2 Persentase pelayanan kesehatan pada remaja	80%	52%	78%	58%	74.36%	79%		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		u.2 Persentase kejadian bencana dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		v.2 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	95%	95.7%	94.60%	90.46%	95.62%	95%		
		w.2 Persentase Cakupan Vaksinasi Covid-19	95%		90%	62%	68.89%	95%		
		x.2 Persentase desa/kelurahan yang bebas pasung	95%	90%	93%	100%	107.53%	94%	100%	106%
		y.2 Persentase penderita HT yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		z.2 Persentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	a) Persentase ibu hamil yang dilayani ANC Terpadu	100%	86%	100%	86%	86%	100%		
		b) Persentase bumil komplikasi ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
02	2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	a) Persentase neonatus komplikasi ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		b) Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	98%	95%	96%	85.36%	89%	97%		
		c) Persentase penggunaan alat kontrasepsi oleh PUS	70%	67%	70%	70.85%	101%	70%		
03	1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	a) Persentase BBL yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
04	3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	a) Persentase balita dipantau tumbuh kembangnya	100%	92%	100%	92%	92%	100%		
05	4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	a) Persentase murid SD dilakukan penjarangan kesehatan	100%	54%	100%	100%	100%	100%		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
06	5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	a) Persentase remaja yang dilakukan pemantauan kesehatannya	100%	70%	100%	70%	70%	100%		
07	6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	a) Persentase Usila mendapat skrening dan pemeriksaan kesehatan	59%	54%	58%	73%	126%	58%		
11	7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	a) Insiden rate Penyakit TB paru per 100.000 penduduk	1874	1862	1874	1874	100%	1874		
12	8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	a) Prevalensi penyakit HIV/AIDS	95%	84%	95%	84%	88%			
13	9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	a) Persentase penyakit potensial KLB terpantau	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b) Persentase laporan ketepatan dan kelengkapan laporan SKDR	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	a) Persentase penduduk mendapatkan vaksin Covid-19 sesuai dengan sasaran	70%	74.27%	90%	70%	78%	95%		
		b) Jumlah pasien positif covid 19 yang diisolasi di shelter	> 50%	23%	> 50%	3%	100%	> 50%		
		c) Prosentase masyarakat yang memanfaatkan JAPRIDOKTER	1%	0.70%	1%	1%	80%	1%		
15	11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	a) Persentase bayi BBLR	4,2%	4%	4,4%	3,16%	72%	4,4%		
		b) Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		c) Jumlah Bumil KEK	15%	16,30%	19,5%	16,30%	84%	19,3%		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
16	12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	a) Persentase Puskesmas menyelenggarakan K3 Puskesmas (internal)	45%	79%	35%	82%	234%	40%		
		b) Persentase Pos UKK yang dibina	50%	50%	45%	53%	118%	45%		
		c) Persentase pembinaan K3 Perkantoran	45%	35%	40%	37%	93%	40%		
		d) Persentase pengukuran kebugaran jasmani jamaah haji	85%	0%	85%	100%	118%	85%		
		e) Persentase pengukuran kebugaran jasmani anak sekolah SD (kelas 4-6)	30%	20%	25%	40%	160%	25%		
		f) Presentase pembinaan terhadap kelompok / klub olahraga masyarakat	45%	35%	40%	38%	95%	40%		
		g) Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan olahraga internal	40%	30%	35%	30%	86%	40%		
17	13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	a) Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	80%	67%	72%	68%	94%	76%		
		c) Persentase rumah tangga akses air bersih memenuhi syarat	95%	75%	94%	75%	80%	94%		
		d) Persentase TFU memenuhi syarat	67%	50%	65%	52%	80%	65%		
		e) Persentase TPP memenuhi syarat	49%	50%	45%	52%	116%	47%		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		f) Persentase pasien penderita penyakit berbasis lingkungan yang dikonseling di Klinik Sanitasi	10%/ 20%/ 40%	5%	10%/ 20%/ 40%	7%	70%	10%/ 20%/ 40%		
18	14) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	a) Jumlah kegiatan promosi kesehatan melalui media cetak	10 paket	9 paket	10 paket	9 paket	90%	10 paket	9 paket	90%
		b) Jumlah kegiatan promosi kesehatan melalui media elektronik	1446 kali	1446 kali	1440 kali	1446 kali	100%	1440 kali	1446 kali	100%
19	15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	a) Persentase puskesmas yang memiliki pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	85%	2%	75%	3%	5%	80%		
		b) Persentase sarana pengobatan tradisional yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		c) Persentase kelompok asman toga yang terbentuk	50%	30%	50%	34%	85%	60%		
		d) Persentase hatra yang memiliki STPT	35%	10%	25%	13%	63%	30%		
20	16) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	a) Jumlah kasus AFP pada penduduk usia < 15 tahun yang ditemukan	6	1	6	3	100%	6	6	100%
		b) Jumlah kasus bukan campak dan bukan rubella yang ditemukan	55	6	40	41	125%	45	50	90.91%
		c) Persentase CJH dilakukan pemeriksaan kesehatan	100%	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		d) Cakupan Imunisasi Lanjutan Baduta (usia 18 sd 24 bulan)	95%	86,3%	90.3%	100%	100%	95%	14,7%	15%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		e) Cakupan Imunisasi DT pada anak kelas 1 SD	95%	94,9%	95%	100%	100%	95%	0%	80%
		f) Cakupan Imunisasi Campak pada anak kelas 1 SD	95%	94,8%	95%	109%	100%	95%	0%	80%
		g) Cakupan Imunisasi Td pada anak SD kelas 2 dan 5	95%	95,1 %	95%	110%	100%	95%	0%	80%
		h) Cakupan Imunisasi TT 5 pada WUS (15-49 th)	85%	10,5%	85%	25%	29%	85%	11,86%	13,3%
		i) Cakupan Imunisasi TT2 plus bumil (15-49 th)	85%	0.78	85%	89,1%	100%	85%	14,82%	13,3%
		k) Persentase Laporan KIPI Zero reporting / KIPI Non serius dikerjakan	90%	0.9	90%	90%	100%	90%	15%	15%
22	17) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	a) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan	100%	61.70%	75%	92%	123%	90%	80%	88.89%
		b) Persentase penderita depresi pada penduduk usia >15 tahun	50%	10%	30%	12%	40%	40%	30%	75%
		c) Persentase gangguan mental emosional (GME) pada penduduk usia >15 tahun yang diberikan pelayanan	50%	20%	30%	28%	93%	40%	30%	75%
23	18) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	a) Persentase operasional kegiatan di PMI dilaksanakan sesuai rencana	100%		100%	100%		100%		
25	19) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	a) Insiden rate penyakit TB paru						270		
		b) Angka Bebas Jentik (ABJ)			95%			90%		
		c) Prevalensi penyakit Kusta						5%		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		d) Angka Kejadian Malaria (API)						1%		
		e) Persentase penemuan dan pengobatan kasus leptospirosis						100%		
		f) Persentase penemuan dan pengobatan kasus filariasis						100%		
		g) Persentase penemuan dan pengobatan pneumonia balita						100%		
		h) Persentase penemuan dan pengobatan kasus diare						100%		
		i) Persentase Puskesmas yang menerapkan Pelayanan Terpadu (Pandu) PTM sesuai standar	80%	6.45%	60%	77%	128%	70%	80%	114%
		j) Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan Posbindu PTM	95%	95.76%	85%	97%	114%	90%	98%	109%
		m) Persentase obesitas pada penduduk usia lebih 18 tahun	20%	12.11%	20%	7%	35%	20%	15%	75%
		n) Persentase wanita usia 30-50 tahun yang melaksanakan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara	30%	10.18%	25%	24%	96%	25%	25%	100%
26	20) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	a) Persentase masyarakat miskin yang masuk dalam pembiayaan jaminan kesehatan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		b) Jmlh puskesmas dengan indikator angka kontak dengan rating 4	31 Pusk	6 Pusk	31 Pusk	10 Pusk	32.26%	31 Pusk		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		c) Jmlh puskesmas dengan indikator RRNS dengan rating 4	31 Pusk	30 Pusk	31 Pusk	28 Pusk	90.32%	31 Pusk		
		d) Jmlh puskesmas dengan indikator RPPT dengan rating 4	31 Pusk	2 Pusk	31 Pusk	2 Pusk	6.45%	31 Pusk		
34	52) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	a) Persentase operasional GFK dilaksanakan sesuai rencana	100%	99%	100%	100%		100%		
		b) Persentase operasional LABKESDA dilaksanakan sesuai rencana	100%	100%	100%	100%		100%		
35	53) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	a) Jumlah puskesmas yang didampingi re-akreditasi UTAMA	20 Pusk	0%	13 Pusk	16.13%		16 Pusk		
37	54) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	a) Jumlah penyakit potensial KLB yang dipantau	23	23	23	23	100	23	23	100%
		b) Persentase ketepatan laporan SKDR	≥95%	74.22%	≥90%	95%	100%	≥95%	90%	95%
		c) Persentase kelengkapan laporan SKDR	≥95%	93.82%	≥90%	99%	100%	≥95%	90%	95%
		d) Persentase Desa mengalami KLB dilaporkan dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38	54) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	a) Persentase puskesmas yang melaksanakan penugasan dari call centre PSC	100%		100%			100%		
		b) Persentase tim krisis kesehatan puskesmas yang dibina	70%		70%	95%		70%		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		c) Persentase tim ambulan desa siaga menjaga standar kelengkapan dan fungsi ambulan desa siaga yang dibina	100%		100%	93%		100%		
2.03	1.3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	a.3 Persentase informasi publik yang dikelola sesuai peruntukannya	100%		100%	96%	100%	100%		
02	1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	a) Persentase rekomendasi surat ijin penelitian yang diterbitkan	100%		100%	100%	100%	100%		
		b) Persentase puskesmas yang didampingi SIMPUSnya	31 pus		31 pus	31 pus	100%	31 pus		
		c) Persentase media publikasi yang dikelola	3 media		3 media	3 media	100%	3 media		
2.04	1.4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat	a.4 Persentase pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	100%		100%	100%		100%		
01	1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas	a) Jumlah rumah sakit ditetapkan status akreditasi PARIPURNA	6 RS		6 RS	6 RS		6 RS		
		b) Persentase rumah sakit dengan PPGD	100%		100%	100%		100%		
03	2) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	a) Jumlah puskesmas yang melaksanakan kunjungan keluarga dan intervensi lanjut	31 Pus	31 Pus	31 Pus	31 Pus	100%	31 Pus		
1.02.03	3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90		89			90		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.04	4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90		89			90		
2.01	1.1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	a.1 Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki ijin usaha	100%		100%			100%		
02	1) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	a) Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) diberikan rekomendasi ijin usaha	100%		100%			100%		
2.03	1.2 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin	a.2 Persentase cakupan SPKP dan SPPIRT yang diterbitkan	100%		100%			100%		
01	1) Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	a) Jumlah SPKP yang diterbitkan	200		200			200		
		b) Prosentase SPP-IRT yang diverifikasi	100%		100%			100%		
2.06	1.3 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	a.3 Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang memenuhi standar kesehatan	100%		100%			100%		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01	1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	a) Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan pemeriksaan	100%		100%			100%		
1 02 04 2.02	1.4 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	a.3 Persentase PKRT yang meemenuhi standar	100%		100%			100%		
1 02 04 2.02 01	1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	a) Persentase PKRT yang dibina	100%		100%	75%	75%	100%	80%	
1.02.05	5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	a. Angka Kematian Ibu (AKI)	94.04		94.08	79.70		94.06		
		b. Angka Kematian Bayi (AKB)	11.89		11.93	14.80		11.91		
		c. Prevalensi balita stunting	<20%		<20%	9.33%		<20%		
2.01	1.1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	a.1 Persentase rumah tangga sehat	60%	37931	58%	49247	58.06%	59%	54905	59%
		b.1 Persentase Posyandu PURI	80%	993	77%	95.77%	92.59%	78%	1055	93.11%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Kabupaten/ Kota	c.1	Persentase desa siaga strata madya	98%	307	45%	100%	100%	46.0%	307	100%
01	1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	a)	Persentase rumah tangga dikaji	20%	65856	20%	15907	26%	20%	90000	27%
		b)	Persentase Institusi Pendidikan yang dikaji	50%	774	50%	489	96.5%	50%	985	97.3%
		c)	Persentase Pondok Pesantren (Ponpes) yang dikaji	60%	63	60%	79	89.7%	60%	80	90.9%
		d)	Persentase kader posyandu dibina	100%	5660	100%	5665	100%	100%	5665	100%
		e)	Persentase UKBM yang diukur & dibina tingkat perkembangannya	100%	4	100%	100%	100%	100%	4	100%
		f)	Persentase kader desa siaga yang dibina	85%	4.938	85%	4.938	100%	85%	4.938	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Ponorogo termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Timur terdiri dari 21 Kecamatan, 26 Kelurahan dan 281 Desa. Secara geografis sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, sebelah Selatan dengan Kabupaten Pacitan serta sebelah Barat dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah). Kondisi geografis dengan luas wilayah Kabupaten Ponorogo memberikan peluang dan tantangan karena mempunyai dampak terhadap timbulnya masalah kesehatan yang komprehensif, oleh karena itu program/kegiatan yang dilaksanakan harus memiliki tolak ukur serta indikator yang lengkap sehingga akan mudah dalam melakukan evaluasi.

Capaian kinerja pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022 dapat dilihat dengan membandingkan capaian Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 sesuai dengan target yang ditetapkan. Realisasi capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	94.08	79,7	100%
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	11.93	14.8	80%
3	Prevalensi Balita Stunting	<20%	9.33%	100%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	87.66	98%
5	% Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas	4.2%	61.29%	100%
6	CFR Covid-19	< 6%	6.4%	93%
7	CFR HIV/AIDS	28%	8.4%	100%
8	CFR TB paru per 100.000 penduduk	5.16	3.76	100%
9	Persentase Desa Bebas DBD	52%	17%	33%
10	Proporsi penderita kusta anak per 10.000 penduduk	0%	2.1%	42%
11	Persentase Desa UCI	97%	70.6%	73%
12	Prevalensi Hipertensi	40.12%	18.9%	100%
13	Prevalensi Diabetes melitus	2.08%	2.1%	100%

Dari tabel capaian kinerja di atas hasil pengukuran kinerja sasaran dan kegiatan secara umum 78% sudah baik, sedangkan 22% sisanya masih menjadi tugas besar Dinas Kesehatan untuk memperbaikinya. Meskipun beberapa indikator dinilai kurang namun faktor penyebabnya diketahui sehingga bisa diupayakan untuk perbaikannya serta menjadi program prioritas tahun anggaran berikutnya. Dukungan anggaran kesehatan yang mencukupi, kerjasama lintas program dan lintas sektor serta peran serta masyarakat

diharapkan akan ada korelasi yang positif dengan meningkatnya capaian program sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal. Fokus kegiatan Tahun 2025 diarahkan untuk pemenuhan target vaksinasi Covid-19, pembangunan RS Tipe D, penurunan angka stunting peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Memberikan pelayanan bermutu bagi masyarakat merupakan tujuan pembangunan kesehatan apalagi salah satu pilar utama program Indonesia sehat adalah JKN dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya. Dengan puskesmas sebagai PPK-BLUD dimana puskesmas bisa mengelola keuangannya secara mandiri dan fleksible serta puskesmas terakreditasi, hal ini diharapkan semakin meningkatkan mutu akses puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi masyarakat, sehingga tujuan Dinas Kesehatan yaitu **meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan** dalam mendukung *Nawa Darma Nyata 3 : “Mewujudkan Hak Dasar Masyarakat dalam bentuk Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Profesional” Misi 2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya*, dapat tercapai sesuai dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Ponorogo

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2022	2023	2024	
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	-	96.89	96.99	96.89	96.79	95	94.08	349.86	141.57	79.70	141.57	94.08	94.06	Tidak Terpenuhi
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	-	23	23.87	23	22.13	11.95	11.93	11.9	10.72	14.80	10.72	11.93	11.91	Terpenuhi
3	Prevalensi balita stunting	<20%	-	25.0%	24.8%	24.8%	<20%	<20%	15.6%	13.53%	9.33%	13.53%	<20%	<20%	Terpenuhi
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	80	80	82	84	89	89	81.49	86.26	87.66	86.26	89	90	Terpenuhi
5	% puskesmas terakreditasi	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Terpenuhi
6	% Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	-	60%	13%	16%	16%	3.7%	4.2%	3.2%	56%	61.29%	56%	4.2%	4.7%	Terpenuhi
7	CFR Covid-19	-	-	-	-	10%	<8%	<6%	12%	3.63%	6.40%	3.63%	<6%	<6%	Tidak Terpenuhi
8	CFR HIV/AIDS	-	40%	18%	17%	17%	30%	28%	13%	23%	8.4%	23%	28%	26%	Tidak Terpenuhi
9	CFR TB paru per 100.000 pddk	-	0.92	2	2	2	5.26	5.16	6.61	3.87	3.76	3.87	5.16	5.06	Terpenuhi
10	Persentase Desa Bebas DBD	-	0%	8%	10%	12%	50%	52%	1.6%	2.6%	17.0%	2.6%	52%	54%	Tidak Terpenuhi
11	Proporsi penderita kusta anak	< 5%	-	< 5%	< 5%	< 5%	0%	0%	6%	0%	2.1%	0%	0%	0%	Terpenuhi
12	Persentase Desa UCI	85%	-	85%	85%	85%	95%	97%	92%	98%	70.6%	98%	97%	98%	Tidak Terpenuhi
13	Prevalensi Hipertensi	40%	-	30%	30%	30%	40.17%	40.12%	6%	12.4%	18.9%	12.4%	40.12%	40.07%	Tidak Terpenuhi
14	Prevalensi Diabetes melitus	2%	-	30%	30%	30%	2.13%	2.08%	1.5%	2%	2.1%	2%	2.08%	2.03%	Tidak Terpenuhi

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari analisis perkembangan dan masalah pembangunan kesehatan, serta dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka isu strategis pada urusan kesehatan di Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Pandemi *Corona virus 2019 (COVID-19)* menjadi masalah kesehatan masyarakat, ekonomi dan social.
2. Vaksinasi *Corona virus 2019 (COVID-19)* belum memenuhi target.
3. Pengalihan dukungan kepesertaan PBID Provinsi ke PBID kabupaten.
4. Pemenuhan dan distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang belum sesuai standar.
5. Ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas masih belum memenuhi standar.
6. Re-Akreditasi puskesmas dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terhambat akibat pandemi COVID-19.
7. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan ditambah adanya kecenderungan peningkatan kesakitan dan kematian karena penyakit degenerative.
8. Semakin tingginya kasus kegawatdaruratan yang memerlukan penanganan khusus baik situasi KLB, bencana maupun kecelakaan.
9. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program, dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi Lintas Sektor.
10. Pola Perilaku Hidup Masyarakat dalam pembangunan kesehatan masih banyak yang belum memenuhi paradigma sehat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rancangan Awal RKPD yang telah disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Ponorogo telah mengakomodir semua program dan kegiatan yang menjadi rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Keselarasan program dan kegiatan hal ini nampak baik dalam jumlah maupun indikator yang terdapat dalam Rancangan Awal RKPD dibandingkan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program dan kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Identifikasi atas rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan yang dikonsolidasikan dalam KUA dan PPAS sebagai Dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Dinas Kesehatan	a. Persentase Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana yang memadai	100%	93,735,996.75	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Dinas Kesehatan	a. Persentase Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana yang memadai	100%	143,691,796.75	
			b. Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program dan anggaran secara partisipatif dan tepat waktu	100%				b. Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program dan anggaran secara partisipatif dan tepat waktu	100%		
			c. Persentase pelaksanaan administrasi, realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan asset yang akuntabel	100%				c. Persentase pelaksanaan administrasi, realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan asset yang akuntabel	100%		
	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		a.1 Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100,000.00	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		a.1 Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	30,000.00	
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		a) Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai juknis	6 dok	50,000.00	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		a) Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai juknis	6 dok	15,000.00	
			b) Jumlah dokumen usulan anggaran yang disusun sesuai timeline dan juknis	6 dok				b) Jumlah dokumen usulan anggaran yang disusun sesuai timeline dan juknis	6 dok		
			c) Jumlah dokumen hubungan kausal dan fungsional yang dikerjakan sesuai peraturan yang berlaku	2 dok				c) Jumlah dokumen hubungan kausal dan fungsional yang dikerjakan sesuai peraturan yang berlaku	2 dok		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			d) Jumlah aplikasi perencanaan dan dikelola sesuai peruntukannya	17 apl				d) Jumlah aplikasi perencanaan dan dikelola sesuai peruntukannya	17 apl		
	2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		a) Jumlah dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun tepat waktu	3 dok	50,000.00	2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		a) Jumlah dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun tepat waktu	3 dok	15,000.00	
			b) Jumlah dokumen laporan kinerja pemerintah yang disusun tepat waktu dan sesuai sistematika	3 dok				b) Jumlah dokumen laporan kinerja pemerintah yang disusun tepat waktu dan sesuai sistematika	3 dok		
			c) Jumlah dokumen laporan realisasi program dan kegiatan dilaporkan tepat waktu	6 dok				c) Jumlah dokumen laporan realisasi program dan kegiatan dilaporkan tepat waktu	6 dok		
			d) Jumlah dokumen laporan kinerja program kesehatan	7 dok				d) Jumlah dokumen laporan kinerja program kesehatan	7 dok		
	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		a.2 Persentase administrasi, realisasi dan pelaporan keuangan yang dikerjakan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	91,530,818.00	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		a.2 Persentase administrasi, realisasi dan pelaporan keuangan yang dikerjakan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	142,096,618.00	
			b.2 Persentase administrasi asset yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan	100%				b.2 Persentase administrasi asset yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		a) Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	100%	90,730,818.00	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		a) Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	100%	141,486,618.00	
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		a) Persentase dokumen SPP/SPM yang diterbitkan sesuai pengajuan	100%	650,000.00	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		a) Persentase dokumen SPP/SPM yang diterbitkan sesuai pengajuan	100%	580,000.00	
			b) Persentase pengelola keuangan dan barang diberikan honorinya	100%				b) Persentase pengelola keuangan dan barang diberikan honorinya	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
	3) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		a) Jumlah dokumen laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 dok	150,000.00	3) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		a) Jumlah dokumen laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 dok	30,000.00		
			b) Jumlah dokumen rekonsiliasi penerimaan yang diterbitkan	372 dok				b) Jumlah dokumen rekonsiliasi penerimaan yang diterbitkan	372 dok			
			c) Jumlah dokumen rekonsiliasi asset tetap yang diterbitkan	12 dok				c) Jumlah dokumen rekonsiliasi asset tetap yang diterbitkan	12 dok			
			d) Jumlah dokumen SP3B yang diterbitkan	372 dok				d) Jumlah dokumen SP3B yang diterbitkan	372 dok			
			e) Jumlah dokumen rekomendasi hibah yang diterbitkan	1 dok				e) Jumlah dokumen rekomendasi hibah yang diterbitkan	1 dok			
			f) Jumlah kerangka acuan kegiatan puskesmas yang dikaji	31 KAK				f) Jumlah kerangka acuan kegiatan puskesmas yang dikaji	31 KAK			
			g) Jumlah puskesmas yang disupervisi dalam rangka pelaksanaan kebijakan upaya kesehatan	31 Pusk				g) Jumlah puskesmas yang disupervisi dalam rangka pelaksanaan kebijakan upaya kesehatan	31 Pusk			
			h) Jumlah rancangan laporan pengelolaan keuangan yang disusun dan atau dikaji	3751 Lap				h) Jumlah rancangan laporan pengelolaan keuangan yang disusun dan atau dikaji	3751 Lap			
	1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah		a.3 Persentase administrasi perkantoran dilaksanakan sesuai SOP	100%	700,178.75	1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah		a.3 Persentase administrasi perkantoran dilaksanakan sesuai SOP	100%	410,178.75		
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		a) Persentase komponen listrik disediakan sesuai rencana	100%	10,000.00	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		a) Persentase komponen listrik disediakan sesuai rencana	100%	10,000.00		
	2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor		a) Persentase makanan minuman disediakan sesuai kebutuhan	100%	350,000.00	2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor		a) Persentase makanan minuman disediakan sesuai kebutuhan	100%	285,000.00		
			b) Persentase kegiatan Pengadaan ATK yang dikelola sesuai rencana	100%				b) Persentase kegiatan Pengadaan ATK yang dikelola sesuai rencana	100%			

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		a) Persentase kegiatan cetak/penggandaan yang dikelola sesuai rencana	100%	25,178.75	3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		a) Persentase kegiatan cetak/penggandaan yang dikelola sesuai rencana	100%	10,178.75	
	4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		a) Persentase media cetak dan peraturan hukum disediakan sesuai kebutuhan	100%	15,000.00	4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		a) Persentase media cetak dan peraturan hukum disediakan sesuai kebutuhan	100%	5,000.00	
	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		a) Persentase pegawai yang dibiayai perjalanan dinasnya sesuai kebutuhan	100%	300,000.00	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		a) Persentase pegawai yang dibiayai perjalanan dinasnya sesuai kebutuhan	100%	100,000.00	
	1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		a.4 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	125,000.00	1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		a.4 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100,000.00	
	1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		a. Persentase pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dilaksanakan sesuai rencana	100%	-	1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		a. Persentase pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dilaksanakan sesuai rencana	100%	-	
	2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		a. Persentase pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan sesuai rencana	100%	75,000.00	2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		a. Persentase pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan sesuai rencana	100%	75,000.00	
	3) Pengadaan Mebel				50,000.00	3) Pengadaan Mebel				25,000.00	
	1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		a.5 Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	770,000.00	1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		a.5 Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	675,000.00	
			b.5 Persentase administrasi kepegawaian tepat waktu	100%					b.5 Persentase administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat		a) Persentase kegiatan administrasi kantor (surat menyurat) yang dikelola sesuai rencana	100%	30,000.00	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat		a) Persentase kegiatan administrasi kantor (surat menyurat) yang dikelola sesuai rencana	100%	30,000.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		a) Persentase komponen pendukung perkantoran (telpon, air, listrik) dikelola sesuai rencana	100%	600,000.00	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		a) Persentase komponen pendukung perkantoran (telpon, air, listrik) dikelola sesuai rencana	100%	580,000.00	
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		a) Persentase jasa administrasi dikelola sesuai rencana	100%	140,000.00	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		a) Persentase jasa administrasi dikelola sesuai rencana	100%	65,000.00	
			b) Persentase jasa kebersihan kantor dilaksanakan sesuai rencana	100%				b) Persentase jasa kebersihan kantor dilaksanakan sesuai rencana	100%		
	1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		a.6 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	510,000.00	1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		a.6 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	380,000.00	
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		a) Persentase jasa pemeliharaan kendaraan dinas dilaksanakan sesuai rencana	100%	350,000.00	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		a) Persentase jasa pemeliharaan kendaraan dinas dilaksanakan sesuai rencana	100%	275,000.00	
			b) Persentase kendaraan dinas yang diurus pajaknya sesuai rencana	100%				b) Persentase kendaraan dinas yang diurus pajaknya sesuai rencana	100%		
	2) Pemeliharaan Mebelair		a) Persentase jasa pemeliharaan mebeleur dilaksanakan sesuai rencana	100%	25,000.00	2) Pemeliharaan Mebelair		a) Persentase jasa pemeliharaan mebeleur dilaksanakan sesuai rencana	100%	25,000.00	
	3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		a) Persentase jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan sesuai rencana	100%	50,000.00	3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		a) Persentase jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan sesuai rencana	100%	20,000.00	
	4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50,000.00	4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25,000.00	
	5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35,000.00	5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35,000.00	
2.	2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	a. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	95	67,736,450.93	2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Dinas Kesehatan	a. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	95	70,336,450.93	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		b. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	11.95		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		b. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	11.95			
			c. Prevalensi balita stunting	<20%				c. Prevalensi balita stunting	<20%			
			d. Indeks Kepuasan Masyarakat	89				d. Indeks Kepuasan Masyarakat	89			
			e. % puskesmas terakreditasi	100%				e. % puskesmas terakreditasi	100%			
			f. % Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	3.7%				f. % Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	3.7%			
			g. CFR Covid-19	<8%				g. CFR Covid-19	<8%			
			h. CFR HIV/AIDS	30%				h. CFR HIV/AIDS	30%			
			i. CFR TB paru per 100.000	5.26				i. CFR TB paru per 100.000	5.26			
			j. Persentase Desa Bebas DBD	50%				j. Persentase Desa Bebas DBD	50%			
			k. Proporsi penderita kusta anak	0%				k. Proporsi penderita kusta anak	0%			
			l. Persentase Desa UCI	95%				l. Persentase Desa UCI	95%			
			m. Prevalensi Hipertensi	40.17%				m. Prevalensi Hipertensi	40.17%			
			o. Prevalensi Diabetes melitus	2.13%				o. Prevalensi Diabetes melitus	2.13%			
		1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		a.1 Persentase bangunan RS Tipe D memenuhi standar	100%		29,223,438.82	1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		a.1 Persentase bangunan RS Tipe D memenuhi standar	100%	28,823,438.82
			b.1 Persentase bangunan puskesmas/ pustu/ rumah dinas yang memenuhi standar	90%				b.1 Persentase bangunan puskesmas/ pustu/ rumah dinas yang memenuhi standar	90%			
			c.1 Persentase puskesmas memiliki IPAL sesuai dengan standar	100%				c.1 Persentase puskesmas memiliki IPAL sesuai dengan standar	100%			
			d.1 Persentase ketersediaan alkes sesuai dengan standar kebutuhan	50%				d.1 Persentase ketersediaan alkes sesuai dengan standar kebutuhan	50%			
			e.1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin puskesmas sesuai standar	100%				e.1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin puskesmas sesuai standar	100%			

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			f.1 Persentase ketersediaan BMHP puskesmas sesuai standar	100%				f.1 Persentase ketersediaan BMHP puskesmas sesuai standar	100%		
	1) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		a) Persentase standar kebutuhan bangunan RS tipe D dibangun sesuai rencana	100%	-	1) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		a) Persentase standar kebutuhan bangunan RS tipe D dibangun sesuai rencana	100%	-	
	2) Pembangunan Puskesmas		a) Persentase pembangunan puskesmas/ pustu/ rumah dinas sesuai dengan rencana	100%	11,610,560.40	2) Pembangunan Puskesmas		a) Persentase pembangunan puskesmas/ pustu/ rumah dinas sesuai dengan rencana	100%	11,610,560.40	
	3) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				3,500,000.00	3) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				3,500,000.00	
	4) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		a) Persentase pengadaan prasarana dan pendukung fasyankes sesuai dengan rencana	100%	4,308,110.12	4) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		a) Persentase pengadaan prasarana dan pendukung fasyankes sesuai dengan rencana	100%	4,308,110.12	
	5) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		a) Persentase rehab / renovasi puskesmas/ pustu/ rumah dinas sesuai dengan rencana	100%	1,000,000.00	3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		a) Persentase rehab / renovasi puskesmas/ pustu/ rumah dinas sesuai dengan rencana	100%	1,000,000.00	
	6) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		a) Persentase pengadaan prasarana dan pendukung fasyankes sesuai dengan rencana	100%	-	4) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		a) Persentase pengadaan prasarana dan pendukung fasyankes sesuai dengan rencana	100%	-	
	7) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		a) Persentase pengadaan alkes sesuai dengan rencana	100%	2,621,900.00	5) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		a) Persentase pengadaan alkes sesuai dengan rencana	100%	2,221,900.00	
	8) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		a) Persentase alkes yang terkalibrasi sesuai dengan rencana	100%	66,784.00	6) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		a) Persentase alkes yang terkalibrasi sesuai dengan rencana	100%	66,784.00	
	9) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		a) Persentase pengadaan jumlah dan jenis obat dan vaksin sesuai rencana	100%	5,981,983.30	7) Pengadaan Obat, Vaksin		a) Persentase pengadaan jumlah dan jenis obat dan vaksin sesuai rencana	100%	5,981,983.30	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
	10) Pengadaan Bahan Habis Pakai		a) Persentase pengadaan jumlah dan jenis BMHP sesuai rencana	100%	-	8) Pengadaan Bahan Habis Pakai		a) Persentase pengadaan jumlah dan jenis BMHP sesuai rencana	100%	-		
	11) Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya		a) Persentase operasional distribusi alkes, obat, vaksin, BMHP dan makanan minuman sesuai dengan rencana	100%	134,101.00	9) Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya		a) Persentase operasional distribusi alkes, obat, vaksin, BMHP dan makanan minuman sesuai dengan rencana	100%	134,101.00		
	1.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		a.2 Persentase K4	93%	37,522,467.11	1.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		a.2 Persentase K4	93%	40,522,467.11		
			c.2 Persentase peserta KB aktif	70%					c.2 Persentase peserta KB aktif	70%		
			d.2 Persentase pelayanan kesehatan pada balita	94%					d.2 Persentase pelayanan kesehatan pada balita	94%		
			e.2 Persentase pelayanan kesehatan pada anak SD	88%					e.2 Persentase pelayanan kesehatan pada anak SD	88%		
			f.2 Persentase pelayanan kesehatan pada remaja	80%					f.2 Persentase pelayanan kesehatan pada remaja	80%		
			g.2 Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	60%					g.2 Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	60%		
			h.2 Persentase balita wasting (gizi buruk dan kurang)	8%					h.2 Persentase balita wasting (gizi buruk dan kurang)	8%		
			i.2 Persentase desa/kelurahan STBM	9%					i.2 Persentase desa/kelurahan STBM	9%		
			j.2 Persentase Pos UKK dengan strata madya	8%					j.2 Persentase Pos UKK dengan strata madya	8%		
			k.2 Persentase pelayanan kesehatan primer sesuai standar (akreditasi utama)	64.52%					k.2 Persentase pelayanan kesehatan primer sesuai standar (akreditasi utama)	64.52%		
			l.2 Persentase pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	100%					l.2 Persentase pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	100%		
			m.2 Persentase pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	80%					m.2 Persentase pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	80%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			o.2 Persentase puskesmas dengan optimalisasi Pelayanan Kesehatan oleh Peserta JKN	100%				o.2 Persentase puskesmas dengan optimalisasi Pelayanan Kesehatan oleh Peserta JKN	100%		
			p.2 Angka kesembuhan kasus konfirmasi Covid-19	90%				p.2 Angka kesembuhan kasus konfirmasi Covid-19	90%		
			q.2 Angka Keberhasilan pengobatan kasus HIV/AIDS	75%				q.2 Angka Keberhasilan pengobatan kasus HIV/AIDS	75%		
			r.2 Success Rate pengobatan kasus TBC	75%				r.2 Success Rate pengobatan kasus TBC	75%		
			s.2 RFT penderita Kusta	85%				s.2 RFT penderita Kusta	85%		
			t.2 Persentase Desa KLB dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam	100%				t.2 Persentase Desa KLB dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam	100%		
			u.2 Persentase kejadian bencana dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam	100%				u.2 Persentase kejadian bencana dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam	100%		
			v.2 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	95%				v.2 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	95%		
			w.2 Persentase Cakupan Vaksinasi Covid-19	95%				w.2 Persentase Cakupan Vaksinasi Covid-19	95%		
			x.2 Persentase desa/kelurahan yang bebas pasung	95%				x.2 Persentase desa/kelurahan yang bebas pasung	95%		
			y.2 Persentase penderita HT yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%				y.2 Persentase penderita HT yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
			z.2 Persentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%				z.2 Persentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
	1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		a) Persentase ibu hamil yang dilayani ANC Terpadu	100%	200,000.00	1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		a) Persentase ibu hamil yang dilayani ANC Terpadu	100%	200,000.00		
			b) Persentase bumil komplikasi ditangani	100%				b) Persentase bumil komplikasi ditangani	100%			
	2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		a) Persentase neonatus komplikasi ditangani	100%	50,000.00	2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		a) Persentase neonatus komplikasi ditangani	100%	50,000.00		
			b) Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	98%				b) Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	98%			
			c) Persentase penggunaan alat kontrasepsi oleh PUS	70%				c) Persentase penggunaan alat kontrasepsi oleh PUS	70%			
	3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		a) Persentase BBL yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	158,500.00	3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		a) Persentase BBL yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	158,500.00		
	4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		a) Persentase balita dipantau tumbuh kembangnya	100%	135,245.00	4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		a) Persentase balita dipantau tumbuh kembangnya	100%	135,245.00		
	5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		a) Persentase murid SD dilakukan penjangkaran kesehatan	100%	50,000.00	5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		a) Persentase murid SD dilakukan penjangkaran kesehatan	100%	50,000.00		
	6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		a) Persentase remaja yang dilakukan pemantauan kesehatannya	100%	100,000.00	6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		a) Persentase remaja yang dilakukan pemantauan kesehatannya	100%	100,000.00		
	7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		a) Persentase Usia mendapat skrening dan pemeriksaan kesehatan	59%	50,000.00	7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		a) Persentase Usia mendapat skrening dan pemeriksaan kesehatan	59%	50,000.00		
	8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Diabetes melitus		a) Persentase kegiatan pembinaan program puskesmas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana		958,839.70	8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Diabetes melitus		a) Persentase kegiatan pembinaan program puskesmas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana		958,839.70		
	9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Hipertensi		a) Persentase kegiatan pembinaan program puskesmas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana		50,000.00	9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Hipertensi		a) Persentase kegiatan pembinaan program puskesmas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana		50,000.00		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
	10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		a) Insiden rate Penyakit TB paru per 100.000 penduduk	1874	1,109,600.00	8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		a) Insiden rate Penyakit TB paru per 100.000 penduduk	1874	1,109,600.00		
	11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV		a) Prevalensi penyakit HIV/AIDS		228,000.00	9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV		a) Prevalensi penyakit HIV/AIDS		228,000.00		
	12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		a) Persentase penyakit potensial KLB terpantau	100%	-	10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		a) Persentase penyakit potensial KLB terpantau	100%	-		
			b) Persentase laporan ketepatan dan kelengkapan laporan SKDR	100%				b) Persentase laporan ketepatan dan kelengkapan laporan SKDR	100%			
	13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana		a) Persentase penduduk mendapatkan vaksin Covid-19 sesuai dengan sasaran	95%	-	11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana		a) Persentase penduduk mendapatkan vaksin Covid-19 sesuai dengan sasaran	95%	-		
			b) Jumlah pasien positif covid 19 yang diisolasi di shelter	> 50%					b) Jumlah pasien positif covid 19 yang diisolasi di shelter	> 50%		
			c) Prosentase masyarakat yang memanfaatkan JAPRIDOKTER	1%					c) Prosentase masyarakat yang memanfaatkan JAPRIDOKTER	1%		
	14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		a) Persentase bayi BBLR	4.2%	292,300.00	12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		a) Persentase bayi BBLR	4.2%	292,300.00		
			b) Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%					b) Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%		
			c) Jumlah Bumil KEK	19.1%					c) Jumlah Bumil KEK	19.1%		
	15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		a) Persentase Puskesmas menyelenggarakan K3 Puskesmas (internal)	45%	100,000.00	13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		a) Persentase Puskesmas menyelenggarakan K3 Puskesmas (internal)	45%	100,000.00		
			b) Persentase Pos UKK yang dibina	50%					b) Persentase Pos UKK yang dibina	50%		
			c) Persentase pembinaan K3 Perkantoran	45%					c) Persentase pembinaan K3 Perkantoran	45%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			d) Persentase pengukuran kebugaran jasmani jamaah haji	85%				d) Persentase pengukuran kebugaran jasmani jamaah haji	85%		
			e) Persentase pengukuran kebugaran jasmani anak sekolah SD (kelas 4-6)	30%				e) Persentase pengukuran kebugaran jasmani anak sekolah SD (kelas 4-6)	30%		
			f) Presentase pembinaan terhadap kelompok / klub olahraga masyarakat	45%				f) Presentase pembinaan terhadap kelompok / klub olahraga masyarakat	45%		
			g) Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan olahraga internal	40%				g) Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan olahraga internal	40%		
	16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		a) Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	80%	1,193,252.88	14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		a) Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	80%	1,193,252.88	
			c) Persentase rumah tangga akses air bersih memenuhi syarat	95%				c) Persentase rumah tangga akses air bersih memenuhi syarat	95%		
			d) Persentase TFU memenuhi syarat	67%				d) Persentase TFU memenuhi syarat	67%		
			e) Persentase TPP memenuhi syarat	49%				e) Persentase TPP memenuhi syarat	49%		
			f) Persentase pasien penderita penyakit berbasis lingkungan yang dikonseling di Klinik Sanitasi	10%/ 20%/ 40%				f) Persentase pasien penderita penyakit berbasis lingkungan yang dikonseling di Klinik Sanitasi	10%/ 20%/ 40%		
	17) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		a) Jumlah kegiatan promosi kesehatan melalui media cetak	10 paket	378,001.00	15) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		a) Jumlah kegiatan promosi kesehatan melalui media cetak	10 paket	378,001.00	
			b) Jumlah kegiatan promosi kesehatan melalui media elektronik	1440 kali				b) Jumlah kegiatan promosi kesehatan melalui media elektronik	1440 kali		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
	18) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		a) Persentase puskesmas yang memiliki pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	85%	138,087.03	16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		a) Persentase puskesmas yang memiliki pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	85%	138,087.03		
			b) Persentase sarana pengobatan tradisional yang dibina	100%				b) Persentase sarana pengobatan tradisional yang dibina	100%			
			c) Persentase kelompok asman toga yang terbentuk	80%				c) Persentase kelompok asman toga yang terbentuk	80%			
			d) Persentase hattra yang memiliki STPT	35%				d) Persentase hattra yang memiliki STPT	35%			
	19) Pengelolaan Surveilans Kesehatan		a) Jumlah kasus AFP pada penduduk usia < 15 tahun yang ditemukan	6	265,800.00	17) Pengelolaan Surveilans Kesehatan		a) Jumlah kasus AFP pada penduduk usia < 15 tahun yang ditemukan	6	265,800.00		
			b) Jumlah kasus bukan campak dan bukan rubella yang ditemukan	50				b) Jumlah kasus bukan campak dan bukan rubella yang ditemukan	50			
			c) Persentase CJH dilakukan pemeriksaan kesehatan	100%				c) Persentase CJH dilakukan pemeriksaan kesehatan	100%			
			d) Cakupan Imunisasi Lanjutan Baduta (usia 18 sd 24 bulan)	95%				d) Cakupan Imunisasi Lanjutan Baduta (usia 18 sd 24 bulan)	95%			
			e) Cakupan Imunisasi DT pada anak kelas 1 SD	95%				e) Cakupan Imunisasi DT pada anak kelas 1 SD	95%			
			f) Cakupan Imunisasi Campak pada anak kelas 1 SD	95%				f) Cakupan Imunisasi Campak pada anak kelas 1 SD	95%			
			g) Cakupan Imunisasi Td pada anak SD kelas 2 dan 5	95%				g) Cakupan Imunisasi Td pada anak SD kelas 2 dan 5	95%			
			h) Cakupan Imunisasi TT 5 pada WUS (15-49 th)	85%				h) Cakupan Imunisasi TT 5 pada WUS (15-49 th)	85%			
			i) Cakupan Imunisasi TT2 plus bumil (15-49 th)	85%				i) Cakupan Imunisasi TT2 plus bumil (15-49 th)	85%			

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
			k) Persentase Laporan KIPi Zero reporting / KIPi Non serius dikerjakan	90%				k) Persentase Laporan KIPi Zero reporting / KIPi Non serius dikerjakan	90%			
	20) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		a) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan	100%	114,000.00	18) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		a) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan	100%	114,000.00		
			b) Persentase penderita depresi pada penduduk usia >15 tahun	50%				b) Persentase penderita depresi pada penduduk usia >15 tahun	50%			
			c) Persentase gangguan mental emosional (GME) pada penduduk usia >15 tahun yang diberikan pelayanan	50%				c) Persentase gangguan mental emosional (GME) pada penduduk usia >15 tahun yang diberikan pelayanan	50%			
	21) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		a) Persentase operasional kegiatan di PMI dilaksanakan sesuai rencana	100%	200,000.00	19) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		a) Persentase operasional kegiatan di PMI dilaksanakan sesuai rencana	100%	200,000.00		
	22) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		a) Insiden rate penyakit TB paru		2,149,114.00	20) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		a) Insiden rate penyakit TB paru		2,149,114.00		
			b) Angka Bebas Jentik (ABJ)	95%				b) Angka Bebas Jentik (ABJ)	95%			
			c) Prevalensi penyakit Kusta					c) Prevalensi penyakit Kusta				
			d) Angka Kejadian Malaria (API)					d) Angka Kejadian Malaria (API)				
			e) Persentase penemuan dan pengobatan kasus leptospirosis					e) Persentase penemuan dan pengobatan kasus leptospirosis				
			f) Persentase penemuan dan pengobatan kasus filariasis					f) Persentase penemuan dan pengobatan kasus filariasis				
			g) Persentase penemuan dan pengobatan pneumonia balita					g) Persentase penemuan dan pengobatan pneumonia balita				
			h) Persentase penemuan dan pengobatan kasus diare					h) Persentase penemuan dan pengobatan kasus diare				
			i) Persentase Puskesmas yang menerapkan Pelayanan Terpadu (Pandu) PTM sesuai standar	80%				i) Persentase Puskesmas yang menerapkan Pelayanan Terpadu (Pandu) PTM sesuai standar	80%			

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			j) Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan Posbindu PTM	95%				j) Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan Posbindu PTM	95%		
			m) Persentase obesitas pada penduduk usia lebih 18 tahun	20%				m) Persentase obesitas pada penduduk usia lebih 18 tahun	20%		
			n) Persentase wanita usia 30-50 tahun yang melaksanakan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara	30%				n) Persentase wanita usia 30-50 tahun yang melaksanakan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara	30%		
	23) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		a) Persentase masyarakat miskin yang masuk dalam pembiayaan jaminan kesehatan daerah	100%	26,921,520.50	21) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		a) Persentase masyarakat miskin yang masuk dalam pembiayaan jaminan kesehatan daerah	100%	29,921,520.50	
			b) Jmlh puskesmas dengan indikator angka kontak dengan rating 4	31 Pusk				b) Jmlh puskesmas dengan indikator angka kontak dengan rating 4	31 Pusk		
			c) Jmlh puskesmas dengan indikator RRNS dengan rating 4	31 Pusk				c) Jmlh puskesmas dengan indikator RRNS dengan rating 4	31 Pusk		
			d) Jmlh puskesmas dengan indikator RPPT dengan rating 4	31 Pusk				d) Jmlh puskesmas dengan indikator RPPT dengan rating 4	31 Pusk		
	24) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				8,800.00					8,800.00	
	25) Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat				300,000.00					300,000.00	
	26) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		a) Persentase operasional GFK dilaksanakan sesuai rencana	100%	537,607.00	22) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		a) Persentase operasional GFK dilaksanakan sesuai rencana	100%	537,607.00	
			b) Persentase operasional LABKESDA dilaksanakan sesuai rencana	100%				b) Persentase operasional LABKESDA dilaksanakan sesuai rencana	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	27) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota		a) Jumlah puskesmas yang didampingi re-akreditasi UTAMA	20 Pusk	50,000.00	23) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota		a) Jumlah puskesmas yang didampingi re-akreditasi UTAMA	20 Pusk	50,000.00	
	28) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				6,200.00					6,200.00	
	29) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		a) Jumlah penyakit potensial KLB yang dipantau	23	100,000.00	24) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		a) Jumlah penyakit potensial KLB yang dipantau	23	100,000.00	
			b) Persentase ketepatan laporan SKDR	≥95%				b) Persentase ketepatan laporan SKDR	≥95%		
			c) Persentase kelengkapan laporan SKDR	≥95%				c) Persentase kelengkapan laporan SKDR	≥95%		
			d) Persentase Desa mengalami KLB dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam	100%				d) Persentase Desa mengalami KLB dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam	100%		
	30) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		a) Persentase puskesmas yang melaksanakan penugasan dari call centre PSC	100%	1,500,000.00	25) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		a) Persentase puskesmas yang melaksanakan penugasan dari call centre PSC	100%	1,500,000.00	
			b) Persentase tim krisis kesehatan puskesmas yang dibina	70%				b) Persentase tim krisis kesehatan puskesmas yang dibina	70%		
			c) Persentase tim ambulan desa siaga menjaga standar kelengkapan dan fungsi ambulan desa siaga yang dibina	100%				c) Persentase tim ambulan desa siaga menjaga standar kelengkapan dan fungsi ambulan desa siaga yang dibina	100%		
	31) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		a) Prevalensi API		12,000.00			a) Prevalensi API		12,000.00	
	32) Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		a) Persentase kegiatan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilaksanakan sesuai rencana	100%	165,600.00			a) Persentase kegiatan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilaksanakan sesuai rencana	100%	165,600.00	
	1.3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		a.3 Persentase informasi publik yang dikelola sesuai peruntukannya	100%	350,000.00	1.3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		a.3 Persentase informasi publik yang dikelola sesuai peruntukannya	100%	350,000.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		a) Persentase rekomendasi surat ijin penelitian yang diterbitkan	100%	350,000.00	1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		a) Persentase rekomendasi surat ijin penelitian yang diterbitkan	100%	350,000.00	
			b) Persentase puskesmas yang didampingi SIMPUSnya	31 puskesmas				b) Persentase puskesmas yang didampingi SIMPUSnya	31 puskesmas		
			c) Persentase media publikasi yang dikelola	3 media				c) Persentase media publikasi yang dikelola	3 media		
	1.4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah		a.4 Persentase pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	100%	640,545.00	1.4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah		a.4 Persentase pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	100%	640,545.00	
	1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		a) Jumlah rumah sakit ditetapkan status akreditasi PARIPURNA	6 RS	50,000.00	1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		a) Jumlah rumah sakit ditetapkan status akreditasi PARIPURNA	6 RS	50,000.00	
			b) Persentase rumah sakit dengan PPGD	100%				b) Persentase rumah sakit dengan PPGD	100%		
	2) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		a) Jumlah puskesmas yang melaksanakan kunjungan keluarga dan intervensi lanjut	31 Pusk	590,545.00	2) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		a) Jumlah puskesmas yang melaksanakan kunjungan keluarga dan intervensi lanjut	31 Pusk	590,545.00	
3.	3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Dinas Kesehatan	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	9,855,099.78	3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Dinas Kesehatan	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	9,855,099.78	
	1.1 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan		a.1 Persentase pemenuhan SDM sesuai dengan kebutuhan	70%	7,660,533.78	1.1 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan		a.1 Persentase pemenuhan SDM sesuai dengan kebutuhan	70%	7,660,533.78	
			a.2 Persentase puskesmas dengan pemenuhan SDM sesuai standar (9 jenis)	80%				a.2 Persentase puskesmas dengan pemenuhan SDM sesuai standar (9 jenis)	80%		
	1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		a) Persentase perawat ponkesdes aktif	100%	7,478,946.78	1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		a) Persentase perawat ponkesdes aktif	100%	7,478,946.78	
			b) Persentase puskesmas yang memiliki tenaga dokter	100%				b) Persentase puskesmas yang memiliki tenaga dokter	100%		
	2) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				181,587.00					181,587.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	1.2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		a.2 Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan rencana dan kebutuhan	100%	2,194,566.00	1.2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		a.2 Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan rencana dan kebutuhan	100%	2,194,566.00	
	1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		a) Prosentase ASN bidang kesehatan yang terfasilitasi untuk mengikuti kegiatan diklat sesuai dengan rencana dan kebutuhan	100%	2,194,566.00	1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		a) Prosentase ASN bidang kesehatan yang terfasilitasi untuk mengikuti kegiatan diklat sesuai dengan rencana dan kebutuhan	100%	2,194,566.00	
			b) Persentase pejabat fungsional yang terfasilitasi untuk penerbitan PAK dan penyelenggaraan UKOM	100%				b) Persentase pejabat fungsional yang terfasilitasi untuk penerbitan PAK dan penyelenggaraan UKOM	100%		
4.	4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	618,831.00	4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	618,831.00	
	1.1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		a.1 Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki ijin usaha	100%	42,961.50	1.1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		a.1 Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki ijin usaha	100%	42,961.50	
	1) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		a) Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) diberikan rekomendasi ijin usaha	100%	42,961.50	1) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		a) Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) diberikan rekomendasi ijin usaha	100%	42,961.50	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	1.2 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		a.2 Persentase cakupan SPKP dan SPPIRT yang diterbitkan	100%	378,200.00	1.2 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		a.2 Persentase cakupan SPKP dan SPPIRT yang diterbitkan	100%	378,200.00	
	1) Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah		a) Jumlah SPKP yang diterbitkan	200	378,200.00	1) Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		a) Jumlah SPKP yang diterbitkan	200	378,200.00	
			b) Prosentase SPP-IRT yang diverifikasi	100%				b) Prosentase SPP-IRT yang diverifikasi	100%		
	1.3 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		a.3 Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang memenuhi standar kesehatan	100%	197,669.50	1.3 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		a.3 Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang memenuhi standar kesehatan	100%	197,669.50	
	1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		a) Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan pemeriksaan	100%	197,669.50	1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		a) Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan pemeriksaan	100%	197,669.50	
	1.4 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		a.3 Persentase PKRT yang meemenuhi standar	100%	-	1.4 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		a.3 Persentase PKRT yang meemenuhi standar	100%	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		a) Persentase PKRT yang dibina	100%	-	1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		a) Persentase PKRT yang dibina	100%	-	
5.	5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	a. Angka Kematian Ibu (AKI)	94.04	1,499,544.72	5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	a. Angka Kematian Ibu (AKI)	94.04	937,361.58	
			b. Angka Kematian Bayi (AKB)	11.89				b. Angka Kematian Bayi (AKB)	11.89		
			c. Prevalensi balita stunting	<20%				c. Prevalensi balita stunting	<20%		
	1.1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		a.1 Persentase rumah tangga sehat	60%	1,452,368.72	1.1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		a.1 Persentase rumah tangga sehat	60%	890,185.58	
			b.1 Persentase Posyandu PURI	80%				b.1 Persentase Posyandu PURI	80%		
			c.1 Persentase desa siaga strata madya	47%				c.1 Persentase desa siaga strata madya	47%		
	1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		a) Persentase rumah tangga dikaji	20%	1,452,368.72	1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		a) Persentase rumah tangga dikaji	20%	890,185.58	
			b) Persentase Institusi Pendidikan yang dikaji	50%				b) Persentase Institusi Pendidikan yang dikaji	50%		
			c) Persentase Pondok Pesantren (Ponpes) yang dikaji	60%				c) Persentase Pondok Pesantren (Ponpes) yang dikaji	60%		
			d) Persentase kader posyandu dibina	100%				d) Persentase kader posyandu dibina	100%		
			e) Persentase UKBM yang diukur & dibina tingkat perkembangannya	100%				e) Persentase UKBM yang diukur & dibina tingkat perkembangannya	100%		
			f) Persentase kader desa siaga yang dibina	85%				f) Persentase kader desa siaga yang dibina	85%		
	1.2 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				47,176.00	1.2 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				47,176.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		a) Persentase kegiatan pembinaan kader dilaksanakan sesuai rencana	100%	47,176.00	1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		a) Persentase kegiatan pembinaan kader dilaksanakan sesuai rencana	100%	47,176.00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan, memacu keikutsertaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain dalam era globalisasi, Perangkat Daerah dituntut untuk siap dan sanggup membuat dan menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Program Kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 telah mengakomodir usulan serta masukan masyarakat, kebutuhan pemerintah daerah dan telah sesuai dengan Program dalam Renstra Perangkat Daerah serta telah mampu mendukung capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	A. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
	1) Pembangunan Puskesmas	Kauman, Kunti, Sambit	Jumlah bangunan puskesmas/ pustu/ rumah dinas sesuai dengan rencana	3 Sarana	Puskesmas Kauman Baru, Kunti, Sambit
	2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Sukorejo, Sooko, Sambit	Jumlah bangunan pustu direhab sesuai rencana	4 Sarana	Pustu Gelanglor, Suru, Ngadirojo, Campursari
	3) Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	32 Pustu di 32 Desa/ Kel.	Jumlah IPAL yang dibangun sesuai rencana	32 Sarana	IPAL Pustu
	4) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	21 Kecamatan	Terpenuhi obat-obatan dan BMHP dalam rangka ILP sesuai rencana	62 Sarana	62 Puskesmas/ Pustu
	B. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	21 Kecamatan	Persentase balita gizi buruk ditangani	31 Puskesmas	Pembinaan petugas gizi, supervisi penanganan ibu hamil dengan masalah gizi
	2) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	21 Kecamatan	Persentase Desa Bebas DBD	25 Fokus	Pengadaan insektisida (obat fogging)
	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
A. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					
1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Desa / Kelurahan	Persentase posyandu balita ditingkatkan kualitas layanannya	21 Posyandu	Bantuan Operasional, sarana prasarana
	Desa / Kelurahan	Persentase posyandu lansia ditingkatkan kualitas layanannya	21 Posyandu	Bantuan Operasional, sarana prasarana	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Sasaran Indikator Kementerian Kesehatan periode 2020-2024 juga merupakan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat.
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan.
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan **Nawa Darma Nyata 3** : *“Mewujudkan Hak Dasar Masyarakat dalam bentuk Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Profesional; Misi 2, “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya”* menetapkan **Tujuan** yaitu *“**Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.**”*

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :

- a. Angka Kematian Ibu (AKI)
 - b. Angka Kematian Bayi (AKB)
 - c. Prevalensi balita stunting
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :
- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - b. Persentase puskesmas terakreditasi
 - c. Persentase Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta JKN
3. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :
- a. CFR Covid-19
 - b. CFR HIV/AIDS
 - c. CFR TB paru per 100.000 penduduk
 - d. Persentase Desa Bebas DBD
 - e. Proporsi penderita kusta anak
 - f. Persentase Desa UCI
 - g. Prevalensi Hipertensi
 - h. Prevalensi Diabetes melitus

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021–2026, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Kesatu - Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, maka dirumuskan program sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, meliputi kegiatan :
 - a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, meliputi kegiatan :
 - a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Sasaran Kedua - Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, maka dirumuskan program sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, meliputi kegiatan :
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
 - b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi.
 - c. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, meliputi kegiatan :
 - a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota.
 - b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, meliputi kegiatan :
 - a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
 - b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.
 - c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.

Sasaran Ketiga - Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa, maka dirumuskan program sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, meliputi kegiatan :
 - a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Disamping itu untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo juga direncanakan beberapa program dan kegiatan rutin sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, meliputi :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- c. Peningkatan Pelayanan BLUD.

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja dibiayai dari sumber dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni, Dana Alokasi Umum (DAU), Pajak Rokok, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan (BK) Provinsi.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	a. Persentase Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana yang memadai b. Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program dan anggaran secara partisipatif dan tepat waktu c. Persentase pelaksanaan administrasi, realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan asset yang akuntabel	Dinkes	100%	192,138,649,543.00	APBD		100%	201,290,647,020
2.01	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a.1 Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinkes	100%	30,000,000.00	APBD		100%	31,500,000.00
01	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	a) Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai juknis b) Jumlah dokumen usulan anggaran yang disusun sesuai timeline dan juknis c) Jumlah dokumen hubungan kausal dan fungsional yang dikerjakan sesuai peraturan yang berlaku d) Jumlah aplikasi perencanaan dan dikelola sesuai peruntukannya	Dinkes	6 dok 6 dok 2 dok 9 apl	15,000,000.00	APBD		6 dok 6 dok 2 dok 17 apl	15,750,000.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07	2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a) Jumlah dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun tepat waktu	Dinkes	3 dok	15,000,000.00	APBD		3 dok	15,750,000.00
		b) Jumlah dokumen laporan kinerja pemerintah yang disusun tepat waktu dan sesuai sistematika		3 dok				3 dok	
		c) Jumlah dokumen laporan realisasi program dan kegiatan dilaporkan tepat waktu		6 dok				6 dok	
		d) Jumlah dokumen laporan kinerja program kesehatan		7 dok				7 dok	
2.02	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	a.2 Persentase administrasi, realisasi dan pelaporan keuangan yang dikerjakan sesuai peraturan perundang-undangan	Dinkes	100%	142,096,618,000.00	APBD		100%	148,811,448,900.00
		b.2 Persentase administrasi asset yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan		100%				100%	
01	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	a) Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	Dinkes	100%	141,486,618,000.00	APBD		100%	148,170,948,900.00
02	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	a) Jumlah dokumen SPP/SPM yang diterbitkan sesuai pengajuan	Dinkes	100%	580,000,000.00	APBD		100%	609,000,000.00
		b) Persentase pengelola keuangan dan barang diberikan honorinya							
08	3) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	a) Jumlah dokumen laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Dinkes	2 dok	30,000,000.00	APBD		2 dok	31,500,000.00
		b) Jumlah dokumen rekonsiliasi penerimaan yang diterbitkan		372 dok				372 dok	
		c) Jumlah dokumen rekonsiliasi asset tetap yang diterbitkan		12 dok				12 dok	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		d) Jumlah dokumen SP3B yang diterbitkan		372 dok				372 dok	
		e) Jumlah dokumen rekomendasi hibah yang diterbitkan		1 dok				1 dok	
		f) Jumlah kerangka acuan kegiatan puskesmas yang dikaji		31 KAK				31 KAK	
		g) Jumlah puskesmas yang disupervisi dalam rangka pelaksanaan kebijakan upaya kesehatan		31 Pusk				31 Pusk	
		h) Jumlah rancangan laporan pengelolaan keuangan yang disusun dan atau dikaji		3751 Lap				3751 Lap	
2.06	1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	a.3 Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP	Dinkes	100%	410,178,750.00	APBD		100%	430,687,687.50
01	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	a) Persentase komponen listrik disediakan sesuai rencana	Dinkes	100%	10,000,000.00	APBD		100%	10,500,000.00
04	2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a) Persentase makanan minuman disediakan sesuai kebutuhan	Dinkes	100%	285,000,000.00	APBD		100%	299,250,000.00
		b) Persentase kegiatan Pengadaan ATK yang dikelola sesuai rencana		100%				100%	
05	3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	a) Persentase kegiatan cetak/penggandaan yang dikelola sesuai rencana	Dinkes	100%	10,178,750.00	APBD		100%	10,687,687.50
06	4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	a) Persentase media cetak dan peraturan hukum disediakan sesuai kebutuhan	Dinkes	100%	5,000,000.00	APBD		100%	5,250,000.00
09	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a) Persentase pegawai yang dibiayai perjalanan dinasnya sesuai kebutuhan	Dinkes	100%	100,000,000.00	APBD		100%	105,000,000.00
2.07	1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a.4 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	Dinkes	100%	100,000,000.00	APBD		100%	105,000,000.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a. Persentase pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan sesuai rencana	Dinkes	100%	-	APBD		100%	-
11	2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	a. Persentase pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai rencana	Dinkes	100%	75,000,000.00	APBD		100%	78,750,000.00
	3) Pengadaan Mebel		Dinkes		25,000,000.00	APBD			26,250,000.00
2.08	1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a.5 Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP	Dinkes	100%	675,000,000.00	APBD		100%	643,815,000.00
		b.5 Persentase administrasi kepegawaian tepat waktu		100%				100%	
01	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	a) Persentase kegiatan administrasi kantor (surat menyurat) yang dikelola sesuai rencana	Dinkes	100%	30,000,000.00	APBD		100%	31,500,000.00
02	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	a) Persentase komponen pendukung perkantoran (telpon, air, listrik) dikelola sesuai rencana	Dinkes	100%	580,000,000.00	APBD		100%	609,000,000.00
04	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a) Persentase jasa administrasi dikelola sesuai rencana	Dinkes	100%	65,000,000.00	APBD		100%	3,315,000.00
		b) Persentase jasa kebersihan kantor dilaksanakan sesuai rencana	Dinkes	100%		APBD		100%	
2.09	1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a.6 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	Dinkes	100%	380,000,000.00	APBD		100%	399,000,000.00
02	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a) Persentase jasa pemeliharaan kendaraan dinas dilaksanakan sesuai rencana	Dinkes	100%	275,000,000.00	APBD		100%	288,750,000.00
		b) Persentase kendaraan dinas yang diurus pajaknya sesuai rencana		100%				100%	
05	2) Pemeliharaan Mebelair	a) Persentase jasa pemeliharaan mebeleur dilaksanakan sesuai rencana	Dinkes	100%	25,000,000.00	APBD		100%	26,250,000.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	a) Persentase jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan sesuai rencana	Dinkes	100%	20,000,000.00	APBD		100%	21,000,000.00
	4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Dinkes		25,000,000.00	APBD			26,250,000.00
	5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Dinkes		35,000,000.00	APBD			36,750,000.00
2.10	1.7 Peningkatan Pelayanan BLUD	a.7 Indeks Kepuasan Masyarakat wilayah puskesmas	Puskesmas	90	48,446,852,793.00	PAD		94.04	50,869,195,433
		b.7 Strata Akreditasi		Dasar / Madya / Utama / Paripurna				Dasar / Madya / Utama / Paripurna	
		c.7 Persentase Nilai PKP		78%				78%	
01	1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ponorogo Utara	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,693,288,468.00	PAD		100%	1,777,952,891
01	2) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ponorogo Selatan	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,258,974,730.00	PAD		100%	1,321,923,467
01	3) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Siman	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	995,760,000.00	PAD		100%	1,045,548,000
01	4) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ronowijayan	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	930,404,263.00	PAD		100%	976,924,476
01	5) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jenangan	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	2,179,468,618.00	PAD		100%	2,288,442,049

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	6) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Setono	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	809,040,634.00	PAD		100%	849,492,666
01	7) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Babadan	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,346,850,915.00	PAD		100%	1,414,193,461
01	8) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sukosari	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	836,725,231.00	PAD		100%	878,561,493
01	9) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sukorejo	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,803,624,804.00	PAD		100%	1,893,806,044
01	10) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kauman	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,966,998,091.00	PAD		100%	2,065,347,996
01	11) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngrandu	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,259,997,405.00	PAD		100%	1,322,997,275
01	12) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Badegan	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	2,238,348,450.00	PAD		100%	2,350,265,873
01	13) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jambon	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	2,308,196,269.00	PAD		100%	2,423,606,082
01	14) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sampung	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	983,896,167.00	PAD		100%	1,033,090,975
01	15) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kunti	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	597,799,311.00	PAD		100%	627,689,277

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	16) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Balong	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	2,894,250,000.00	PAD		100%	3,038,962,500
01	17) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Slahung	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,957,102,713.00	PAD		100%	2,054,957,849
01	18) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Nailan	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,297,915,929.00	PAD		100%	1,362,811,725
01	19) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bungkal	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,957,073,484.00	PAD		100%	2,054,927,158
01	20) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngrayun	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	4,258,882,000.00	PAD		100%	4,471,826,100
01	21) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sambit	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,166,561,619.00	PAD		100%	1,224,889,700
01	22) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Wringinanom	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	947,816,230.00	PAD		100%	995,207,042
01	23) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sawoo	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	2,900,000,000.00	PAD		100%	3,045,000,000
01	24) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bondrang	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	414,141,206.00	PAD		100%	434,848,266
01	25) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mlarak	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,601,209,795.00	PAD		100%	1,681,270,285
01	26) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jetis	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,887,422,836.00	PAD		100%	1,981,793,978

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	27) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pulung	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	2,073,980,028.00	PAD		100%	2,177,679,029
01	28) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kesugihan	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	733,771,260.00	PAD		100%	770,459,823
01	29) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sooko	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,195,528,985.00	PAD		100%	1,255,305,434
01	30) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngebel	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,347,705,620.00	PAD		100%	1,415,090,901
01	31) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pudak	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	604,117,732.00	PAD		100%	634,323,619
1.02.02	2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	a. Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinkes	94.04	96,039,013,929.00	APBD		94.04	100,840,964,625.45
		b. Angka Kematian Bayi (AKB)		11.89				11.89	
		c. Prevalensi balita stunting		<20%				<20%	
		d. Indeks Kepuasan Masyarakat		90				90	
		e. % puskesmas terakreditasi		100%				100%	
		f. % Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		5.2%				5.2%	
		g. CFR Covid-19		<2%				<2%	
		h. CFR HIV/AIDS		24%				24%	
		i. CFR TB paru paru per 100.000		4.96				4.96	
		j. Persentase Desa Bebas DBD		56%				56%	
		k. Proporsi penderita kusta anak		0%				0%	
		l. Persentase Desa UCI		99%				100%	
		m. Prevalensi Hipertensi		40.02%				40.02%	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		o. Prevalensi Diabetes melitus		1.98%				1.98%	
2.01	1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	a.1 Persentase bangunan RS Tipe D memenuhi standar	Dinkes	100%	28,823,438,820.00	APBD		100%	30,264,610,761.00
		b.1 Persentase bangunan puskesmas/ pustu/ rumah dinas yang memenuhi standar		90%				90%	
		c.1 Persentase puskesmas memiliki IPAL sesuai dengan standar		100%				100%	
		d.1 Persentase puskesmas dengan ketersediaan alkes memenuhi standar		50%				50%	
		e.1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin puskesmas sesuai		100%				100%	
		f.1 Persentase ketersediaan BMHP puskesmas sesuai standar		100%				100%	
01	1) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	a) Persentase standar kebutuhan bangunan RS tipe D dibangun sesuai rencana	Dinkes	100%	-	APBD		100%	-
02	2) Pembangunan Puskesmas	a) Persentase pembangunan puskesmas/ pustu/ rumah dinas sesuai dengan rencana	Dinkes	100%	11,610,560,400.00	APBD		100%	12,191,088,420.00
	3) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Dinkes		3,500,000,000.00	APBD			3,675,000,000.00
	4) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Dinkes		4,308,110,120.00	APBD			4,523,515,626.00
09	5) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	a) Persentase rehab / renovasi puskesmas/ pustu/ rumah dinas sesuai dengan rencana	Dinkes	100%	1,000,000,000.00	APBD		100%	1,050,000,000.00
13	6) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	a) Persentase pengadaan prasarana dan pendukung fasyankes sesuai dengan rencana	Dinkes	100%	-	APBD		100%	-
14	7) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	a) Persentase pengadaan alkes sesuai dengan rencana	Dinkes	100%	2,221,900,000.00	APBD		100%	2,332,995,000.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	8) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	a) Persentase alkes yang terkalibrasi sesuai dengan rencana	Dinkes	100%	66,784,000.00	APBD		100%	70,123,200.00
	9) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	a) Persentase pengadaan jumlah dan jenis obat dan vaksin sesuai rencana	Dinkes	100%	5,981,983,300.00	APBD		100%	6,281,082,465.00
16	10) Pengadaan Obat, Vaksin	a) Persentase pengadaan jumlah dan jenis obat dan vaksin sesuai rencana	Dinkes	100%	-	APBD		100%	-
17	11) Pengadaan Bahan Habis Pakai	a) Persentase pengadaan jumlah dan jenis BMHP sesuai rencana	Dinkes	100%	-	APBD		100%	-
21	12) Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	a) Persentase operasional distribusi alkes, obat, vaksin, BMHP dan makanan minuman sesuai dengan rencana	Dinkes	100%	134,101,000.00	APBD		100%	140,806,050.00
2.02	1.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	a.2 Persentase K4	Dinkes	93%	66,225,030,109.00	APBD		93%	69,536,281,614.45
		c.2 Persentase peserta KB aktif		70%				70%	
		d.2 Persentase pelayanan kesehatan pada balita		94%				94%	
		e.2 Persentase pelayanan kesehatan pada anak SD		88%				88%	
		f.2 Persentase pelayanan kesehatan pada remaja		80%				80%	
		g.2 Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut		60%				60%	
		h.2 Persentase balita wasting (gizi buruk dan kurang)		8%				8%	
		i.2 Persentase desa/kelurahan STBM		9%				9%	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		j.2 Persentase Pos UKK dengan strata madya		8%				8%	
		k.2 Persentase pelayanan kesehatan primer sesuai		64.52%				64.52%	
		l.2 Persentase pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar		100%				100%	
		m.2 Persentase pelayanan kesehatan tradisional sesuai		80%				80%	
		n.2 Jmlh puskesmas dengan optimalisasi Pelayanan Kesehatan oleh Peserta JKN		100%				100%	
		o.2 Angka kesembuhan kasus konfirmasi Covid-19		80%				80%	
		p.2 Angka Keberhasilan pengobatan kasus HIV/AIDS		80%				80%	
		q.2 Success Rate pengobatan kasus TBC		90%				90%	
		r.2 RFT penderita Kusta		90%				90%	
		s.2 Persentase Desa KLB dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam		100%				100%	
		t.2 Persentase kejadian bencana dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam		100%				100%	
		u.2 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap		95%				95%	
		v.2 Persentase Cakupan Vaksinasi Covid-19		95%				95%	
		w.2 Persentase desa/kelurahan yang bebas pasung		95%				95%	
		x.2 Persentase penderita HT yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		100%				100%	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		y.2 Persentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		100%				100%	
01	1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	a) Persentase ibu hamil yang dilayani ANC Terpadu	Dinkes	100%	200,000,000.00	APBD		100%	210,000,000.00
		b) Persentase bumil komplikasi ditangani		100%				100%	
02	2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	a) Persentase neonatus komplikasi ditangani	Dinkes	100%	50,000,000.00	APBD		100%	52,500,000.00
		b) Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan		98%				98%	
		c) Persentase penggunaan alat kontrasepsi oleh PUS		70%				70%	
03	3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	a) Persentase BBL yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkes	100%	158,500,000.00	APBD		100%	166,425,000.00
04	4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	a) Persentase balita dipantau tumbuh kembangnya	Dinkes	100%	135,245,000.00	APBD		100%	142,007,250.00
05	5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	a) Persentase murid SD dilakukan penjangkaran kesehatan	Dinkes	100%	50,000,000.00	APBD		100%	52,500,000.00
06	6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	a) Persentase remaja yang dilakukan pemantauan kesehatannya	Dinkes	100%	100,000,000.00	APBD		100%	105,000,000.00
07	7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	a) Persentase Usila mendapat skrening dan pemeriksaan kesehatan	Dinkes	59%	50,000,000.00	APBD		59%	52,500,000.00
08	8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Diabetes melitus	a) Persentase kegiatan pembinaan program puskesmas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana	Dinkes		958,839,700.00	APBD			1,006,781,685.00
09	9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Hipertensi	a) Persentase kegiatan pembinaan program puskesmas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana	Dinkes		50,000,000.00	APBD			52,500,000.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	a) Insiden rate Penyakit TB paru	Dinkes		1,109,600,000.00	APBD			1,165,080,000.00
12	11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	a) Prevalensi penyakit HIV/AIDS	Dinkes		228,000,000.00	APBD			239,400,000.00
13	12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	a) Persentase penyakit potensial KLB terpantau	Dinkes		-	APBD			-
14	13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	a) Persentase penduduk mendapatkan vaksin Covid-19 sesuai dengan sasaran	Dinkes	95%	-	APBD		95%	-
		b) Jumlah pasien positif covid 19 yang diisolasi di shelter		>50%				>50%	
		c) Prosentase masyarakat yang memanfaatkan JAPRIDOKTER		1%			1%		
15	14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	a) Jumlah bayi BBLR	Dinkes	4.2%	292,300,000.00	APBD		4.2%	306,915,000.00
		b) Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan		100%				100%	
		c) Jumlah Bumil KEK		19.1%				19.1%	
16	15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	a) Persentase Puskesmas menyelenggarakan K3 Puskesmas (internal)	Dinkes	45%	100,000,000.00	APBD		45%	105,000,000.00
		b) Persentase Pos UKK yang dibina		50%				50%	
		c) Persentase pembinaan K3 Perkantoran		45%				45%	
		d) Persentase pengukuran kebugaran jasmani jamaah haji		85%				85%	
		e) Persentase pengukuran kebugaran jasmani anak sekolah SD (kelas 4-6)		30%				30%	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		f) Presentase pembinaan terhadap kelompok / klub olahraga masyarakat		45%				45%	
		g) Presentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan olahraga internal		40%				40%	
17	16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	a) Presentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	Dinkes	80%	1,193,252,880.00	APBD		80%	1,252,915,524.00
		c) Presentase rumah tangga akses air bersih memenuhi		95%				95%	
		d) Presentase TFU memenuhi syarat		67%				67%	
		e) Presentase TPP memenuhi syarat		49%				49%	
		f) Presentase pasien penderita penyakit berbasis lingkungan yang dikonseling di Klinik Sanitasi		10%/20%/40%				10%/20%/40%	
18	17) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	a) Jumlah kegiatan promosi kesehatan melalui media cetak	Dinkes	10 paket	378,001,000.00	APBD		10 paket	396,901,050.00
		b) Jumlah kegiatan promosi kesehatan melalui media elektronik		1440 kali				1440 kali	
19	18) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	a) Presentase puskesmas yang memiliki pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	Dinkes	85%	138,087,029.00	APBD		85%	144,991,380.45
		b) Presentase sarana pengobatan tradisional yang dibina		100%				100%	
		c) Presentase kelompok asman toga yang terbentuk		80%				80%	
		d) Presentase hatra yang memiliki STPT		35%				35%	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	19) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	a) Jumlah kasus AFP pada penduduk usia < 15 tahun	Dinkes	6	265,800,000.00	APBD		6	279,090,000.00
		b) Jumlah kasus bukan campak dan bukan rubella yang ditemukan		50				55	
		c) Persentase CJH dilakukan pemeriksaan kesehatan		100%				100%	
		d) Cakupan Imunisasi Lanjutan Baduta (usia 18 sd 24 bulan)		95%				95%	
		e) Cakupan Imunisasi DT pada anak kelas 1 SD		95%				95%	
		f) Cakupan Imunisasi Campak pada anak kelas 1 SD		95%				95%	
		g) Cakupan Imunisasi Td pada anak SD kelas 2 dan 5		95%				95%	
		h) Cakupan Imunisasi TT 5 pada WUS (15-49 th)		85%				85%	
		i) Cakupan Imunisasi TT2 plus bumil (15-49 th)		90%				90%	
		j) Persentase Laporan KIPI Zero reporting / KIPI Non serius dikerjakan		100%				100%	
22	20) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	a) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan	Dinkes	100%	114,000,000.00	APBD		100%	119,700,000.00
		b) Persentase penderita depresi pada penduduk usia >15 tahun		50%				50%	
		c) Persentase gangguan mental emosional (GME) pada penduduk usia >15 tahun yang diberikan pelayanan		50%				50%	
23	21) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	a) Persentase operasional kegiatan di PMI dilaksanakan sesuai rencana	Dinkes	100%	200,000,000.00	APBD		100%	210,000,000.00
25	22) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	a) Insiden rate penyakit TB paru	Dinkes	150 per 100.000 penduduk	2,149,114,000.00	APBD		150 per 100.000 penduduk	2,256,569,700.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) Angka Bebas Jentik (ABJ)		90%				90%	
		c) Prevalensi penyakit Kusta		0,5 per 10.000 penduduk				0,5 per 10.000 penduduk	
		d) Angka Kejadian Malaria (API)		0,01 per 1000 penduduk				0,01 per 1000 penduduk	
		e) Persentase penemuan dan pengobatan kasus leptospirosis		100%				100%	
		f) Persentase penemuan dan pengobatan kasus filariasis		100%				100%	
		g) Persentase penemuan dan pengobatan pneumonia balita		90%				90%	
		h) Persentase penemuan dan pengobatan kasus diare		90%				90%	
		i) Persentase Puskesmas yang menerapkan Pelayanan Terpadu (Pandu) PTM sesuai standar		80%				80%	
		j) Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan Posbindu PTM		95%				95%	
		k) Persentase obesitas pada penduduk usia lebih 18 tahun		20%				20%	
		l) Persentase wanita usia 30-50 tahun yang melaksanakan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara		30%				30%	
26	23) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	a) Persentase masyarakat miskin yang masuk dalam pembiayaan jaminan kesehatan daerah	Dinkes	100%	29,921,520,500.00	APBD		100%	31,417,596,525.00
		b) Jmlh puskesmas dengan indikator angka kontak dengan rating 4		31 Pusk				31 Pusk	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c) Jmlh puskesmas dengan indikator RRNS dengan rating 4		31 Pusk				31 Pusk	
		d) Jmlh puskesmas dengan indikator RPPT dengan rating 4		31 Pusk				31 Pusk	
27	24) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke		Dinkes		8,800,000.00	APBD			9,240,000.00
28	25) Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat		Dinkes		300,000,000.00	APBD			315,000,000.00
33	26) Puskesmas Ponorogo Utara (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		936,182,000.00	APBD			982,991,100.00
33	27) Puskesmas Ponorogo Selatan (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		940,498,700.00	APBD			987,523,635.00
33	28) Puskesmas Siman (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		852,768,400.00	APBD			895,406,820.00
33	29) Puskesmas Ronowijayan (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		631,722,600.00	APBD			663,308,730.00
33	30) Puskesmas Jenangan (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		1,625,458,800.00	APBD			1,706,731,740.00
33	31) Puskesmas Setono (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		793,349,900.00	APBD			833,017,395.00
33	32) Puskesmas Babadan (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		827,324,500.00	APBD			868,690,725.00
33	34) Puskesmas Sukosari (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		605,444,500.00	APBD			635,716,725.00
33	35) Puskesmas Sukorejo (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		1,010,266,400.00	APBD			1,060,779,720.00
33	36) Puskesmas Kauman (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		982,440,400.00	APBD			1,031,562,420.00
33	37) Puskesmas Ngrandu (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		662,234,400.00	APBD			695,346,120.00
33	38) Puskesmas Badegan (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		816,207,700.00	APBD			857,018,085.00
33	39) Puskesmas Jambon (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		661,244,000.00	APBD			694,306,200.00
33	40) Puskesmas Sampung (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		675,277,000.00	APBD			709,040,850.00
33	41) Puskesmas Kunti (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		554,234,300.00	APBD			581,946,015.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	42) Puskesmas Balong (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		1,079,002,600.00	APBD			1,132,952,730.00
33	43) Puskesmas Slahung (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		820,027,500.00	APBD			861,028,875.00
33	44) Puskesmas Nailan (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		752,325,500.00	APBD			789,941,775.00
33	45) Puskesmas Bungkal (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		1,073,742,800.00	APBD			1,127,429,940.00
33	46) Puskesmas Ngrayun (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		967,302,700.00	APBD			1,015,667,835.00
33	47) Puskesmas Sambit (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		634,942,000.00	APBD			666,689,100.00
33	48) Puskesmas Wringinanom (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		522,258,600.00	APBD			548,371,530.00
33	49) Puskesmas Sawoo (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		864,350,200.00	APBD			907,567,710.00
33	50) Puskesmas Bondrang (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		458,084,000.00	APBD			480,988,200.00
33	51) Puskesmas Mlarak (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		853,404,400.00	APBD			896,074,620.00
33	52) Puskesmas Jetis (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		1,095,269,700.00	APBD			1,150,033,185.00
33	53) Puskesmas Pulung (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		1,009,089,500.00	APBD			1,059,543,975.00
33	54) Puskesmas Kesugihan (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		818,602,700.00	APBD			859,532,835.00
33	55) Puskesmas Sooko (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		819,370,300.00	APBD			860,338,815.00
33	56) Puskesmas Ngebel (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		761,305,900.00	APBD			799,371,195.00
33	57) Puskesmas Pudak (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		598,831,000.00	APBD			628,772,550.00
34	58) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	a) Persentase operasional GFK dilaksanakan sesuai rencana	IFK	100%	537,607,000.00	APBD		100%	564,487,350.00
		b) Persentase operasional LABKESDA dilaksanakan sesuai rencana	Labkesda	100%				100%	
35	59) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	a) Jumlah puskesmas yang didampingi re-akreditasi UTAMA	Dinkes	20 Pusk	50,000,000.00	APBD		20 Pusk	52,500,000.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	60) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Dinkes		6,200,000.00	APBD			6,510,000.00
37	61) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	a) Jumlah penyakit potensial KLB yang dipantau	Dinkes	23	100,000,000.00	APBD		23	105,000,000.00
		b) Persentase ketepatan laporan SKDR		≥95%				≥95%	
		c) Persentase kelengkapan laporan SKDR		≥95%				≥95%	
		d) Persentase Desa mengalami KLB dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam		100%				100%	
38	62) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	a) Persentase puskesmas yang melaksanakan penugasan dari call centre PSC	Dinkes	100%	1,500,000,000.00	APBD		100%	1,575,000,000.00
		b) Persentase tim krisis kesehatan puskesmas yang dibina		70%				70%	
		c) Persentase tim ambulan desa siaga menjaga standar kelengkapan dan fungsi ambulan desa siaga yang dibina		100%				100%	
39	63) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	a) Prevalensi API	Dinkes		12,000,000.00	APBD			12,600,000.00
40	64) Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	a) Persentase kegiatan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilaksanakan sesuai rencana	Dinkes	100%	165,600,000.00	APBD		100%	173,880,000.00
2.03	1.3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	a.3 Persentase sistem informasi dikelola sesuai dengan peruntukannya	Dinkes	100%	350,000,000.00	APBD		100%	367,500,000.00
02	1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	a) Persentase rekomendasi surat izin penelitian yang diterbitkan		100%	350,000,000.00	APBD		100%	367,500,000.00
		b) Persentase puskesmas yang didampingi SIMPUSnya		31 puskesmas				31 puskesmas	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c) Persentase media publikasi yang dikelola		3 media				3 media	
2.04	1.4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	a.4 Persentase pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	Dinkes	100%	640,545,000.00	APBD		100%	672,572,250.00
01	1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas	a) Jumlah rumah sakit ditetapkan status akreditasi PARIPURNA	Dinkes	6 RS	50,000,000.00	APBD		6 RS	52,500,000.00
		b) Persentase rumah sakit dengan PPGD		100%				100%	
03	2) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	a) Jumlah puskesmas yang melaksanakan kunjungan keluarga dan intervensi lanjut	Dinkes	31 puskesmas	590,545,000.00	APBD		31 puskesmas	620,072,250.00
1.02.03	3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dinkes	90	9,855,099,779.00	APBD		90	10,347,854,767.95
2.02	1.1 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	a.1 Persentase pemenuhan SDM Kesehatan sesuai dengan kebutuhan	Dinkes	70%	7,660,533,779.00	APBD		70%	8,043,560,467.95
		a.2 Persentase puskesmas dengan pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar (9 jenis)		80%				80%	
02	1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	a) Jumlah perawat puskesmas aktif	Dinkes	100%	7,478,946,779.00	APBD		100%	7,852,894,117.95
		b) Persentase puskesmas yang memiliki tenaga dokter		100%				100%	
	2) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Dinkes		181,587,000.00	APBD			190,666,350.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03	1.2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	a.2 Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan rencana dan kebutuhan	Dinkes	100%	2,194,566,000.00	APBD		100%	2,304,294,300.00
01	1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	a) Prosentase ASN bidang kesehatan yang terfasilitasi untuk mengikuti kegiatan diklat sesuai dengan rencana dan kebutuhan	Dinkes	100%	2,194,566,000.00	APBD		100%	2,304,294,300.00
		b) Persentase pejabat fungsional yang terfasilitasi untuk penerbitan PAK dan penyelenggaraan UKOM		100%					100%
1.02.04	4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dinkes	90	618,831,000.00	APBD		90	649,772,550.00
2.01	1.1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	a.1 Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki	Dinkes	100%	42,961,500.00	APBD		100%	45,109,575.00
02	1) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	a) Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) diberikan rekomendasi ijin usaha	Dinkes	100%	42,961,500.00	APBD		100%	45,109,575.00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03	1.2 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	a.2 Persentase cakupan SPKP dan SPPIRT yang diterbitkan	Dinkes	100%	378,200,000.00	APBD		100%	397,110,000.00
01	1) Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	a) Jumlah SPKP yang diterbitkan	Dinkes	200	378,200,000.00	APBD		200	397,110,000.00
		b) Prosentase SPP-IRT yang diverifikasi		100%				100%	
2.06	1.3 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	a.3 Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang memenuhi standar kesehatan	Dinkes	100%	197,669,500.00	APBD		100%	207,552,975.00
01	1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	a) Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan pemeriksaan	Dinkes	100%	197,669,500.00	APBD		100%	207,552,975.00
1.02.05	5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	a. Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinkes	94.04	937,361,578.00	APBD		94.04	984,229,656.90
		b. Angka Kematian Bayi (AKB)		11.89				11.89	
		c. Prevalensi balita stunting		<20%				<20%	
2.01	1.1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran	a.1 Persentase rumah tangga sehat	Dinkes	60%	890,185,578.00	APBD		60%	984,229,656.90

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	b.1 Persentase Posyandu PURI		80%				80%	
		c.1 Persentase desa siaga strata madya		47%				47%	
01	1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	a) Persentase rumah tangga dikaji	Dinkes	20%	890,185,578.00	APBD		20%	934,694,856.90
		b) Persentase Institusi Pendidikan yang dikaji		50%				50%	
		c) Persentase Pondok Pesantren (Ponpes) yang dikaji		60%				60%	
		d) Persentase kader posyandu dibina		100%				100%	
		e) Persentase UKBM yang diukur & dibina tingkat		100%				100%	
		f) Persentase kader desa siaga yang dibina		85%				85%	
	1.2 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Dinkes		47,176,000.00	APBD			49,534,800.00
	1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	a) Persentase kegiatan pembinaan kader dilaksanakan sesuai rencana	Dinkes	100%	47,176,000.00	APBD		100%	49,534,800.00
TOTAL ANGGARAN					299,588,955,829.00				314,113,468,620.45

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan sasaran perangkat daerah yaitu (1) meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; (2) meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan; dan (3) menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa, pada periode Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 telah ditetapkan program, kegiatan beserta alokasi anggaran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dinas Kesehatan beserta Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yaitu 31 puskesmas, Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dibantu oleh UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) seperti posyandu balita, posyandu remaja, posyandu lansia, poskestren, desa siaga, poskesdes dan polindes selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik melalui peningkatan mutu dan akses sehingga kebutuhan masyarakat akan kesehatan terpenuhi yang digambarkan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sehingga tujuan pembangunan kesehatan bermuara pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat Ponorogo.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
1					DINAS KESEHATAN							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana yang memadai	100%	93,735,996,750			143,691,796,750	
						Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program dan anggaran secara partisipatif dan tepat waktu	100%					
						Persentase pelaksanaan administrasi, realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel	100%					
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100,000,000			30,000,000	
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai juknis	6 dokumen	50,000,000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	15,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah dokumen usulan anggaran yang disusun sesuai timeline dan juknis	6 dokumen					
						Jumlah dokumen hubungan kausal dan fungsional yang dikerjakan sesuai peraturan yang berlaku	2 dokumen					
						Jumlah aplikasi perencanaan dan dikelola sesuai peruntukannya	17 aplikasi					
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun tepat waktu	3 dokumen	50,000,000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	15,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah dokumen laporan kinerja pemerintah yang disusun tepat waktu dan sesuai sistematika	3 dokumen					
						Jumlah dokumen laporan realisasi program dan kegiatan dilaporkan tepat waktu	6 dokumen					
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi, realisasi dan pelaporan keuangan yang dikerjakan sesuai peraturan	100%	91,530,818,000	Kabupaten Ponorogo		142,096,618,000	
						Persentase administrasi aset yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan	100%					
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	100%	90,730,818,000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	141,486,618,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Persentase dokumen SPP/SPM yang diterbitkan sesuai pengajuan	100%	650,000,000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	580,000,000	Dinas Kesehatan
						Persentase pengelola keuangan dan barang diberikan honornya						
1	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
						Jumlah dokumen laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 dokumen	150,000,000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	30,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah dokumen rekonsiliasi penerimaan yang diterbitkan	372 dokumen					
						Jumlah dokumen rekonsiliasi aset tetap yang diterbitkan	12 dokumen					

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah dokumen SP3B yang diterbitkan	372 dokumen					
						Jumlah dokumen rekomendasi hibah yang diterbitkan	1 dokumen					
						Jumlah kerangka acuan kegiatan puskesmas yang dikaji	31 KAK					
						Jumlah puskesmas yang disupervisi dalam rangka pelaksanaan kebijakan upaya kesehatan	31 Puskesmas					
						Jumlah rancangan laporan pengelolaan keuangan yang disusun dan atau dikaji	3751 Laporan					
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran dilaksanakan sesuai SOP	100%	700,178,750	Kabupaten Ponorogo		410,178,750	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Persentase komponen listrik disediakan sesuai rencana	100%	10,000,000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Persentase makanan minuman disediakan sesuai kebutuhan	100%	350,000,000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	285,000,000	Dinas Kesehatan
						Persentase kegiatan Pengadaan ATK yang dikelola sesuai rencana	100%					
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Persentase kegiatan cetak/penggandaan yang dikelola sesuai rencana	100%	25,178,750	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	10,178,750	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan							
						Persentase media cetak dan peraturan hukum disediakan sesuai kebutuhan	100%	15,000,000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Persentase pegawai yang dibiayai perjalanan dinasny sesuai kebutuhan	100%	300,000,000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	72%	125,000,000			100,000,000	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	-		Dana Alokasi Umum	-	
1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	75,000,000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	75,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	770,000,000	Kabupaten Ponorogo		675,000,000	Dinas Kesehatan
						Persentase administrasi kepegawaian tepat waktu	100%					
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Persentase kegiatan administrasi kantor (surat menyurat) yang dikelola sesuai rencana	100%	30,000,000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Persentase komponen pendukung perkantoran (telpn, air, listrik) dikelola sesuai rencana	100%	600,000,000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	580,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Persentase jasa administrasi dikelola sesuai rencana	100%	140,000,000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	65,000,000	Dinas Kesehatan

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	
						Persentase jasa kebersihan kantor dilaksanakan sesuai rencana	100%						
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	510,000,000			380,000,000		
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Persentase jasa pemeliharaan kendaraan dinas dilaksanakan sesuai rencana	100%	350,000,000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	275,000,000	Dinas Kesehatan	
						Persentase kendaraan dinas yang diurus pajaknya sesuai rencana	100%						
1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								
						Persentase jasa pemeliharaan mebeleur dilaksanakan sesuai rencana	100%	25,000,000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	25,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Persentase jasa pemeliharaan mebeleur dilaksanakan sesuai rencana	100%	50,000,000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	20,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	50,000,000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	25,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%	35,000,000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	35,000,000	Dinas Kesehatan	
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) CFR Covid-19 CFR HIV/AIDS CFR TB paru Prevalensi balita stunting Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Desa Bebas DBD Persentase puskesmas terakreditasi Persentase Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Proporsi penderita kusta anak Prevalensi Hipertensi Persentase Desa UCI Prevalensi Diabetes melitus	11.89 94.04 <2 % 24 % 4,96 <20 % 90 56 % 100 % 5,2 % 0 % 40,02 % 91 %	67,736,450,929			70,136,450,929		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan RS Tipe D memenuhi standar	100%	29,223,438,820			-	28,823,438,820	
						Persentase bangunan puskesmas/ pustu/ rumah dinas yang memenuhi standar	90%						
						Persentase puskesmas memiliki IPAL sesuai dengan standar	100%						
						Persentase ketersediaan alkes sesuai dengan standar kebutuhan	50%						
						Persentase ketersediaan obat dan vaksin puskesmas sesuai standar	100%						
						Persentase ketersediaan BMHP puskesmas sesuai standar	100%						
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas								
						Persentase pembangunan puskesmas/ pustu/ rumah dinas sesuai dengan rencana	100%	11,610,560,400	Kabupaten Ponorogo	DBHCHT	11,610,560,400	Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	100%	3,500,000,000	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus	3,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	100%	4,308,110,120	Kabupaten Ponorogo	DAK Fisik, DAU Khusus	4,308,110,120	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas							
						Persentase rehab / renovasi puskesmas/ pustu/ rumah dinas sesuai dengan rencana	100%	1,000,000,000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
						Persentase pengadaan alkes sesuai dengan rencana	100%	2,621,900,000	Kabupaten Ponorogo	DAK Fisik, DAU Khusus	2,221,900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
						Persentase alkes yang terkalibrasi sesuai dengan rencana	100%	66,784,000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik	66,784,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan							
						Persentase pengadaan jumlah dan jenis obat dan vaksin sesuai rencana	100%	5,981,983,300	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik	5,981,983,300	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan							
						Persentase operasional distribusi alkes, obat, vaksin, BMHP dan makanan minuman sesuai dengan rencana	100%	134,101,000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik	134,101,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase K4	93%	37,522,467,109			40,322,467,109	
						Persentase peserta KB aktif	70%					
						Persentase pelayanan kesehatan pada balita	94%					
						Persentase pelayanan kesehatan pada anak SD	88%					
						Persentase pelayanan kesehatan pada remaja	80%					
						Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	60%					
						Persentase balita wasting (gizi buruk dan kurang)	8%					
						Persentase desa/kelurahan STBM	9%					
						Persentase Pos UKK dengan strata madya	8%					
						Persentase pelayanan kesehatan primer sesuai standar (akreditasi utama)	64.52%					
						Persentase pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	100%					
						Persentase pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	80%					
						Persentase puskesmas dengan optimalisasi Pelayanan Kesehatan oleh Peserta JKN	100%					
						Angka kesembuhan kasus konfirmasi Covid-19						
						Angka Keberhasilan pengobatan kasus HIV/AIDS						

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Success Rate pengobatan kasus TBC						
							RFT penderita Kusta						
							Persentase Desa KLB dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam	100%					
							Persentase kejadian bencana dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam	100%					
							Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	95%					
							Persentase Cakupan Vaksinasi Covid-19	95%					
							Persentase desa/kelurahan yang bebas pasung	95%					
							Persentase penderita HT yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%					
							Persentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%					
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Persentase ibu hamil yang dilayani ANC Terpadu	100%	200,000,000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	200,000,000	Dinas Kesehatan
							Persentase bumil komplikasi ditangani	100%					
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Persentase neonatus komplikasi ditangani	100%	50,000,000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	50,000,000	Dinas Kesehatan
							Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	98%					
							Persentase penggunaan alat kontrasepsi oleh PUS	70%					
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
							Persentase BBL yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	158,500,000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik, Dana Alokasi Umum	158,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
							Persentase balita dipantau tumbuh kembangnya	100%	135,245,000	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus	135,245,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Persentase murid SD dilakukan penjangkaran kesehatan	100%	50,000,000	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
							Persentase remaja yang dilakukan pemantauan kesehatannya	100%	100,000,000	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
							Persentase Usila mendapat skrining dan pemeriksaan kesehatan	59%	50,000,000	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
							Persentase kegiatan pembinaan program puskesmas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana		50,000,000	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
							Persentase kegiatan pembinaan program puskesmas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana		958,839,700	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik, DAU Khusus	958,839,700	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Insiden rate Penyakit TB paru		1,109,600,000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik, Dana Alokasi Umum	1,109,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Prevalensi penyakit HIV/AIDS		228,000,000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik, Dana Alokasi Umum	228,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Persentase bayi BBLR	4.20%	292,300,000	Kabupaten Ponorogo		292,300,000	Dinas Kesehatan
							Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%					
							Jumlah Bumil KEK	19.1%					
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Persentase Puskesmas menyelenggarakan K3 Puskesmas (internal)	45%	100,000,000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik, Dana Alokasi Umum	100,000,000	Dinas Kesehatan
							Persentase Pos UKK yang dibina	50%					
							Persentase pembinaan K3 Perkantoran	45%					
							Persentase pengukuran kebugaran jasmani jamaah haji	85%					
							Persentase pengukuran kebugaran jasmani anak sekolah SD (kelas 4-6)	30%					
							Persentase pembinaan terhadap kelompok / klub olahraga masyarakat	45%					
							Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan olahraga internal	40%					
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas air minumannya sesuai standar	80%	1,193,252,880.00	Kabupaten Ponorogo	DAK Fisik, DAK Non Fisik	1,193,252,880	Dinas Kesehatan
							Persentase rumah tangga akses air bersih memenuhi syarat	95%					
							Persentase TFU memenuhi syarat	67%					
							Persentase TPP memenuhi syarat	49%					
							Persentase pasien penderita penyakit berbasis lingkungan yang dikonseling di Klinik Sanitasi	10%/ 20%/ 40%					
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
							Jumlah kegiatan promosi kesehatan melalui media cetak	10 Paket	378,001,000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik	378,001,000	Dinas Kesehatan
							Jumlah kegiatan promosi kesehatan melalui media elektronik	1440 Kali					
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya								
							Persentase puskesmas yang memiliki pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	85%	138,087,029	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	138,087,029	Dinas Kesehatan
							Persentase sarana pengobatan tradisional yang dibina	100%					
							Persentase kelompok asman toga yang terbentuk	80%					

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Persentase hattra yang memiliki STPT	35%					
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah kasus AFP pada penduduk usia < 15 tahun yang ditemukan	6	265,800,000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik, DAU Khusus	265,800,000	Dinas Kesehatan	
						Jumlah kasus bukan campak dan bukan rubella yang ditemukan	50						
						Persentase CJH dilakukan pemeriksaan kesehatan	100%						
						Cakupan Imunisasi Lanjutan Baduta (usia 18 sd 24 bulan)	95%						
						Cakupan Imunisasi DT pada anak kelas 1 SD	95%						
						Cakupan Imunisasi Campak pada anak kelas 1 SD	95%						
						Cakupan Imunisasi Td pada anak SD kelas 2 dan 5	95%						
						Cakupan Imunisasi TT 5 pada WUS (15-49 th)	85%						
						Cakupan Imunisasi TT2 plus bumil (15-49 th)	85%						
						Persentase Laporan KIPI Zero reporting / KIPI Non serius dikerjakan	90%						
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA								
						Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan	100%	114,000,000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik, DAU Khusus	114,000,000	Dinas Kesehatan	
						Persentase penderita depresi pada penduduk usia >15 tahun	50%						
						Persentase gangguan mental emosional (GME) pada penduduk usia >15 tahun yang diberikan pelayanan	50%						
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Insiden rate penyakit TB paru		2,149,114,000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik, DAU Khusus	2,149,114,000	Dinas Kesehatan	
						Angka Bebas Jentik (ABJ)							
						Prevalensi penyakit Kusta							
						Angka Kejadian Malaria (API)							
						Persentase penemuan dan pengobatan kasus leptospirosis							
						Persentase penemuan dan pengobatan kasus filariasis							
						Persentase penemuan dan pengobatan pneumonia balita							
						Persentase penemuan dan pengobatan kasus diare							

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Persentase Puskesmas yang menerapkan Pelayanan Terpadu (Pandu) PTM sesuai standar	80%					
							Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan Posbindu PTM	95%					
							Persentase obesitas pada penduduk usia lebih 18 tahun	20%					
							Persentase wanita usia 30-50 tahun yang melaksanakan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara	30%					
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Persentase masyarakat miskin yang masuk dalam pembiayaan jaminan kesehatan daerah	100%	26,921,520,500	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus, Pajak Rokok	29,921,520,500	Dinas Kesehatan
							Jmlh puskesmas dengan indikator angka kontak dengan rating 4	31 Pusk					
							Jmlh puskesmas dengan indikator RRNS dengan rating 4	31 Pusk					
							Jmlh puskesmas dengan indikator RPPT dengan rating 4	31 Pusk					
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		8,800,000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik	8,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	300,000,000	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Persentase operasional GFK dilaksanakan sesuai rencana	100%	737,607,000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik, DAU Khusus, PAD	537,607,000	Dinas Kesehatan
							Persentase operasional LABKESDA dilaksanakan sesuai rencana	100%					
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota								
							Jumlah puskesmas yang didampingi re-akreditasi UTAMA	20 Puskesmas	50,000,000	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	6,200,000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik	6,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah								
							Jumlah penyakit potensial KLB yang dipantau	23	100,000,000	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus	100,000,000	Dinas Kesehatan
							Persentase ketepatan laporan SKDR	≥95%					
							Persentase kelengkapan laporan SKDR	≥95%					
							Persentase Desa mengalami KLB dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam	100%					

No	Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)							
						Persentase puskesmas yang melaksanakan penugasan dari call centre PSC	100%	1,500,000,000	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
						Persentase tim krisis kesehatan puskesmas yang dibina	70%					
						Persentase tim ambulans desa siaga menjaga standar kelengkapan dan fungsi ambulans desa siaga yang dibina	100%					
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							
						Prevalensi API		12,000,000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik	12,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
						Persentase kegiatan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilaksanakan sesuai rencana	100%	165,600,000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik	165,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase sistem informasi dikelola sesuai dengan peruntukannya	100%	350,000,000			350,000,000.00	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							
						Persentase rekomendasi surat ijin penelitian yang diterbitkan	100%	350,000,000	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus	350,000,000	Dinas Kesehatan
						Persentase puskesmas yang didampingi SIMPUSnya	31 puskesmas					
						Persentase media publikasi yang dikelola	3 media					
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	100%	640,545,000			640,545,000.00	
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya							
						Jumlah rumah sakit ditetapkan status akreditasi PARIPURNA	6 RS	50,000,000	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus	50,000,000	Dinas Kesehatan
						Persentase rumah sakit dengan PPGD	100%					
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan							
						Jumlah puskesmas yang melaksanakan kunjungan keluarga dan intervensi lanjut	31 Puskesmas	590,545,000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik, DAU Khusus	590,545,000	Dinas Kesehatan
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	9,855,099,779			9,855,099,779.00	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SDM sesuai dengan kebutuhan	70%	7,660,533,779			7,660,533,779.00	
						Persentase puskesmas dengan pemenuhan SDM sesuai standar (9 jenis)	80%					
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar							
						Persentase perawat perdesdes aktif	100%	7,478,946,779	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus, BK Propinsi	7,478,946,779	Dinas Kesehatan
						Persentase puskesmas yang memiliki tenaga dokter	100%					
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	181,587,000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik	181,587,000	Dinas Kesehatan

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan rencana dan kebutuhan	100%	2,194,566,000			2,194,566,000.00	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
						Prosentase ASN bidang kesehatan yang terfasilitasi untuk mengikuti kegiatan diklat sesuai dengan rencana dan kebutuhan	100%	2,194,566,000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik, DAU Khusus	2,194,566,000	Dinas Kesehatan
						Persentase pejabat fungsional yang terfasilitasi untuk penerbitan PAK dan penyelenggaraan UKOM	100%					
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	618,831,000			618,831,000.00	
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki ijin usaha	100%	42,961,500			42,961,500.00	
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	42,961,500	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik	42,961,500	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase cakupan SPKP dan SPPIRT yang diterbitkan	100%	378,200,000			378,200,000.00	
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
						Jumlah SPKP yang diterbitkan	200	378,200,000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik	378,200,000	Dinas Kesehatan
						Prosentase SPP-IRT yang diverifikasi	100%					
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang memenuhi standar kesehatan	100%	197,669,500			197,669,500.00	
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan							
						Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan pemeriksaan	100%	197,669,500	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik	197,669,500	Dinas Kesehatan
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Angka Kematian Ibu (AKI)	94.04	1,499,544,721			937,361,578	
						Angka Kematian Bayi (AKB)	11.89					
						Prevalensi balita stunting	<20%					
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga sehat	60%	1,499,544,721	Kabupaten Ponorogo		937,361,578	
						Persentase Posyandu PURI	80%					
						Persentase desa siaga strata madya	47%					
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat							

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
						Persentase rumah tangga dikaji	20%	1,452,368,721	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik, DAU Khusus, BK Provinsi	890,185.578	Dinas Kesehatan
						Persentase Institusi Pendidikan yang dikaji	50%					
						Persentase Pondok Pesantren (Ponpes) yang dikaji	60%					
						Persentase kader posyandu dibina	100%					
						Persentase UKBM yang diukur & dibina tingkat perkembangannya	100%					
						Persentase kader desa siaga yang dibina	85%					
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang diukur & dibina tingkat perkembangannya	100%					
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
						Persentase kegiatan pembinaan kader dilaksanakan sesuai rencana	100%	47,176,000	Kabupaten Ponorogo	Dak Non Fisik	47,176,000	Dinas Kesehatan

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Tahun 2025, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo.

Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai tujuan dan sasaran, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya, Rencana Kerja Kabupaten ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Ponorogo, 1 Agustus 2024

Kepala Dinas Kesehatan

The image shows a blue circular official stamp of the Kabupaten Ponorogo Health Office. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO' and 'DINAS KESEHATAN'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Dyah Ayu Puspitaningarti, SKM.,M.Kes.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197602062002122012